Bela Islam atau Bela Oligarki?

Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia

Anto Sangadji Azhar Irfansyah Eko Prasetyo Fathimah Fildzah Izzati Ian Wilson Iqra Anugrah Muhammad Azka Fahriza Muhammad Nashirulhaq Roy Murtadho

Editor: Dede Mulyanto Coen Husain Pontoh
Kata Pengantar: Dede Mulyanto

Bela Islam atau Bela Oligarki?
Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia

Anto Sangadji
Azhar Irfansyah
Eko Prasetyo
Fathimah Fildzah Izzati
Ian Wilson
Iqra Anugrah
Muhammad Azka Fahriza
Muhammad Nashirulhaq
Roy Murtadho

Editor: Dede Mulyanto Coen Husain Pontoh

Kata Pengantar: Dede Mulyanto

Judul buku: *Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia*
Pengarang: Anto Sangadji, dkk.
Editor: Dede Mulanto & Coen Husain Pontoh
Kata Pengantar: Dede Mulyanto
Desain sampul dan isi: Alit Ambara

Penerbit: Pustaka IndoPROGRESS & Islam Bergerak, 2017

Daftar Buku Saku terbitan Pustaka IndoPROGRESS

Membedah Tantangan Jokowi-JK
Editor dan Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-catatan Investigasi)
Louis Althusser
Kata Pengantar: Martin Suryajaya

Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis
Gerard Dumenil dan Duncan Foley
Kata Pengantar: Mohamad Zaki Hussein

Penghematan Melawan Demokrasi Fase Otoriter Neoliberalisme?
Greg Albo dan Carlo Fanelli
Kata Pengantar: Anto Sangadji

Islam Politik Sebuah Analisis Marxis
Deepa Kumar
Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

Radikalisme Islam di Indonesia Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis
Vedi R. Hadiz
Kata Pengantar: Airlangga Pribadi

Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang
Alfred D. Ticoalu
Kata Pengantar: Made Supriatma

Sejarah Teori Krisis Sebuah Pengantar Analisa Marxis
Anwar Shaikh
Kata Pengantar: Intan Suwandi

Sukarno, Marxisme, dan Bahaya Pemfosilan
Editor: Coen Husain Pontoh
Kata Pengantar: Bonnie Triyana

Marxisme dan Ketuhanan Yang Maha Esa
Editor: Coen Husain Pontoh
Kata Pengantar: Muhammad Al-Fayyadl

Kapitalisme dan Penindasan Terhadap Perempuan: Kembali ke Marx
Martha A. Gimenez
Kata Pengantar: Ruth Indiah Rahayu

Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan
Ruth T. McVey
Kata Pengantar: John Roosa

Marxisme dan Evolusi Manusia
Dede Mulyanto
Kata Pengantar: Sylvia Tiwon

Sosialisme Abad Keduapuluh Satu: Pengalaman Amerika Latin
Martha Harnecker
Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

Daftar Isi:

KataPengantar

Dede Mulyanto

DEMONSTRASI besar-besaran berlangsung pada 4 Nopember 2016. Penggeraknya menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GN-PF-MUI). Demonstran menuntut agar aparat hukum segera memproses kasus pidana penistaan agama, yang menurut fatwa MUI bertanggal 11 Oktober 2016, telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ratusan ribu orang turun ke jalan. Tak cuma ulama dan umat kebanyakan, tapi ada juga artis dan politisi nasional. Puluhan ribu aparat polisi pun dikerahkan mengamankannya.

Peristiwa yang oleh penggeraknya dinamai 'Aksi Bela Islam' tersebut menarik perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena begitu besarnya massa yang turun ke jalanan ibukota, tapi juga, bagi sebagian orang, karena persoalan lebih dalam menyangkut ekonomi-politik di balik hiruk-pikuk massa demonstrasinya. Bagi Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza[1], Aksi Bela Islam membuka tabir watak politis kelas menengah urban Indonesia yang sok tertib, sok santun, sok konstitusional, dan jijik pada segala bentuk aksi massa. Kritik mereka terhadap Aksi Bela Islam tak lebih dari keluh-kesah soal macet, sampah, dan taman yang rusak. Mereka tak sanggup melihat perso-alan lebih dari apa yang dilihat mata telanjang dan didengar telinga mereka. Buat mereka, Aksi Bela Islam tak lebih dari kebisingan yang mengganggu kenyamanan. Mereka sama sekali tak terusik oleh bahan bakar di balik api demonstrasi itu, yakni "neoliberalisasi ekonomi yang membawa ekses pada kehidupan sehari-hari nan keras masyarakat urban". Luka ketimpangan ekonomi yang memang telah menganga dan makin bernanah oleh kebijakan-kebijakan penggusuran Ahok, tak pernah jadi perhatian mereka. Padahal, lingkungan ngeri yang neoliberalisme ciptakan itu punya andil dalam memupuk lahan bagi suburnya semak-semak politik massa dengan identitas agama sebagai perekat solidaritasnya.

1 Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza, *Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan Islam*, Bab 2-4.

Aksi Bela Islam adalah kenyataan. Peristiwa itu menyegarkan kembali imajinasi politik kita bahwa gerakan Islam di Indonesia itu tetap sehat wal afiat meski tak lagi tinggal di dalam partai politik. Kita tak perlu mempersoalkan hidupnya gerakan Islam. Termasuk yang maujud ke dalam aksi-aksi massa. Tak perlu pula kita khawatir soal penggunaan agama sebagai alat politik. Yang perlu dikhawatirkan ialah kenyataan bahwa gerakan Islam di Indonesia masih terjebak di lumpur yang sama yang melahirkan gerutu kelas menengah terhadap aksi massa, yakni kegamangan dalam menghadapi kencangnya arus neoliberalisme dengan penyesuaian struktural membabi-butanya, seperti yang selama ini ditampilkan oleh kebijakan-kebijakan penggusuran yang Ahok jalankan. Bagi kelas menengah urban, kebijakan-kebijakan itu riak wajar dari sungai pembangunan yang akan membawa semua orang ke kemakmuran. Sementara bagi kaum miskin kota, pekerja rentan, dan kumpulan lumpenproletariat yang diciptakan kapitalisme, dan dalam amatan Anto Sangadji[2] dan Ian Wilson[3] menjadi kentang-kentang dalam sekarung kentangnya Aksi Bela Islam kemarin, kebijakan-kebijakan itu dipahami sebagai kebijakan Cina dan kafir karena (kebetulan) Ahok adalah seorang Nasrani dan keturunan Tionghoa pula.

Kegamangan massa gerakan Islam dalam menemukan sasaran tembak lebih dalam ketimbang permukaan atas persoalan yang dialami umat awam di tengah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan mereka yang makin diperparah oleh semaraknya cara pandang dan perilaku individualistik atas konsep ibadah di kalangan kelas menengah Muslim, menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman para penyeru gerakan Islam akan akar-akar persoalan yang adanya di balik segala tampakan data statistik dan hiruk pikuk konsumsi[4]. Satu-satunya hal yang membuat mereka bergerak hanyalah ketika identitas agama mereka terusik. Umat hanya mudah terbakar emosi ketika seorang non-Muslim menghina ayat Al-Quran dan akan merasa paling beriman ketika menuntut keadilannya dengan turun ke jalan bersama ribuan sesamanya. Tapi, mereka tak terluka imannya sama sekali ketika petani-petani Kendeng (yang juga Muslim) berjuang

---

2 Anto Sangadji, *Kontradiksi Kapitalisme dan Rasisme*, Bab 1-1.

3 Ian Wilson, *Teman Dijadikan Musuh*, Bab 1-3.

4 Lihat Eko Prasetyo, *Kelas Menengah Islam: Wajah Keagamaan Tanpa Ide Populis,* Bab 1-2.

melawan keserakahan korporasi yang hendak mengambil petak-petak tanah pertanian tempat mereka menggantungkan hidup hanya karena dianggapnya tak ada ayat yang dihinakan. Padahal, bukankah korporasi telah mendustakan firman Allah SWT dengan berbuat kerusakan di muka bumi (QS Al-A'raf 56) sambil memakan harta orang lain dengan cara yang dzalim (QS Al-Baqarah 188)?

Para pimpinan massa gerakan Islam yang menikmati kenyamanan di bawah elusan tangan-tangan oligarki yang sedang berjuang menjaga kepentingan kelas mereka ditambah dengan sejumput birokratisme ormas-ormas Islam besar yang sudah terlalu mapan dan "dikelola mirip badan usaha"[5] bisa jadi merupakan salah satu sebab dari dangkalnya pemahaman umat atas Bela Islam yang hakiki. Di bawah kepemimpinan semacam itu, massa gerakan Islam, yang kebanyakan berasal dari kelas pekerja atau pekerja rentan perkotaan, akan mudah digerakkan, tanpa sepengetahuan mereka, oleh kekuatan oligarki yang sedang memperebutkan posisi penentu di dalam politik dan pemerintahan. Di dalam kondisi inilah, kekuatan oligarki yang tak ada urusannya sama sekali dengan soal-soal dosa-pahala dan tetek-bengek identitas keagamaan selain memajukan kepentingan mereka sendiri, dengan dana yang memadai akan dengan mudah membakar 'daya juang' massa hanya dengan menyiram isu-isu rasis dan sektarian ke atas tumpukan derita dan amarah yang sebenarnya diciptakan neoliberalisasi kapital yang kian menggilas orang-orang yang sudah sekian lama ada di tubir kemiskinan.

Soalnya bukan apakah penyulutan emosi keagamaan massa itu benar atau salah, tapi soal kapankah ia dimainkan. Alih-alih sumber, aksi massa hanya akan menggebuki bayang-bayang. Tak cuma itu, bahkan bayang-bayang yang mereka timpuki pun sekadar bayang-bayang boneka yang diciptakan dan dipelihara para pemain di balik layar untuk dimainkan. Siapa yang memainkan tak jadi soal, karena yang penting boneka itu ada di dalam imajinasi massa.

Di tengah hiruk-pikuk pertarungan para oligark dalam memenangkan posisi untuk membagi-bagi kue pembangunan seporsi yang memungkinkan mereka kian berkuasa atau setidaknya membuat mereka tidak tergerus

5 *Ibid*

persaingan pada satu sisi, dan derita serta amarah massa yang salah sasaran di sisi lain, para penulis di dalam buku ini setidaknya memikirkan dua perkara yang genting diperjuangkan. *Pertama*, peningkatan mutu kader-kader gerakan dan massa Islam dengan memperlebar cakrawala pandang atas konsepsi Bela Islam yang hakiki, yang tak sekadar menyasar soal-soal identitas dangkal keislaman yang terpaku pada masalah muslim-kafir, tapi juga semangat Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* dengan memperkuat kepekaan dan daya nalar terhadap persoalan-persoalan dan sumber-sumber petaka hakiki yang dialami massa. Oleh karena sumber petaka hakiki (kemiskinan, eksploitasi) tak bisa ditelusuri dari dikotomi muslim-kafir karena dalam perjuangan kapitalisme mengeksploitasi segala yang bisa dieksploitasi tak pernah pandang agama, maka, *kedua*, gerakan massa Islam, selain "membutuhkan basis pengetahuan yang lebih kokoh dan kemampuan untuk membaca realitas politik secara lebih berhati-hati, akurat, dan menyeluruh"[6], juga membutuhkan basis pengetahuan historis dan struktural soal tabiat kapital sebagai kekuatan ekonomi kontemporer serta kelindan kapital dan kekuasaan di Indonesia sejak kolonialisme VOC hingga neoliberalisme[7].***

Jatinangor, Januari 2017

6 Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah Izzati, *Aksi Massa dalam Perspektif Islam Progresif,* Bab 2-2.

7 Sangadji, *op.cit*

I

Konteks Ekonomi Politik

Kontradiksi Kapitalisme dan Rasisme

Anto Sangadji

AKSI MASSA pada 4 November (411) lalu, telah menarik minat para akademisi dan aktivis untuk memahaminya secara lebih sistematis. Dalam tulisan ini, saya ingin melihat aksi bernuansa rasis tersebut dalam hubungannya dengan kapitalisme. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa rasisme itu muncul dalam kondisi-kondisi struktural tertentu, bukan sekadar produk sentimen identitas semata.

Kalau kita perhatikan potret persebaran kekayaan di Indonesia, maka yang tampak adalah bahwa kekayaan itu semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang. *Globe Asia* edisi Juni 2016 membuat daftar 150 orang superkaya Indonesia. Mereka memiliki kombinasi nilai kekayaan bersih USD 155 miliar atau IDR 2.015 triliun. Angka ini kurang lebih sepadan 22,44 persen dari total nilai PDB 2015 (harga konstan 2010). Kekayaan tersebut melebihi penerimaan APBN-P tahun 2016, yang diproyeksikan sekitar IDR 1.786,2 triliun. Lima besar paling tajir adalah Robert Hartono (Djarum), Anthony Salim (First Pacific), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas), Susiolo Wonowidjojo (Gudam Garam) dan Chairul Tanjung (CT corp.). Beberapa tahun lalu, *Globe Asia* edisi Agustus 2012 menurunkan laporan utama tentang 100 grup perusahaan terbesar di Indonesia. Pada tahun itu, disebutkan, kombinasi nilai pendapatan dari perusahaan-perusahaan raksasa ini mencapai USD 149.7 miliar (17.06 persen dari PDB).

Ada dua hal pokok perlu digaris-bawahi berkenaan dengan kaum tajir ini. *Pertama*, mereka bukan sekedar orang kaya. Dalam kapitalisme, sebutan tepat buat mereka adalah kelas kapitalis. Per definisi, mereka adalah kelas kapitalis, karena mempekerjakan buruh upahan dalam bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa. Hubungan produksi begini merupakan syarat utama untuk memperoleh predikat kelas kapitalis. Kaya saja, tanpa memiliki usaha dengan buruh upahan bukan kelas kapitalis. Bersandar pada definisi ini, data Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan tidak kurang dari 3,5 juta orang tergolong sebagai kelas kapitalis di Indonesia. Sayangnya, data SP tidak menyebut skala usaha orang-orang ini. Tetapi, sesuai si-

fat kapitalisme, jumlah terbesar adalah kelas kapitalis berskala menengah dan kecil. Sementara skala besar jumlahnya sangat sedikit. Yang terakhir ini yang menjadi obyek laporan *Globe Asia*.

Kedua, mereka sukses menggerakkan aneka usaha modern di tengah pertumbuhan cepat kapitalisme global dalam 4-5 dasawarsa terakhir. Arus masuk dan keluar investasi, komoditas, dan tenaga kerja lintas batas negara mempercepat atau memudahkan pertumbuhan bisnis mereka. Proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan keuangan yang semakin kencang telah membuat bisnis mereka di sektor produktif (manufaktur, pertambangan, perkebunan, energi, dll), sektor perdagangan, dan sektor keuangan berkembang mulus. Mereka bisa membangun imperium usaha berkat akses ke keuangan, teknologi, dan barang-barang konsumsi yang mengalir dari negara lain. Dan mereka juga bisa memasarkan aneka komoditas (akhir maupun bahan baku) yang mereka produksi ke negeri-negeri lain. Kaum superkaya ini adalah produk kapitalisme global.

Kelas Kapitalis dan Politik

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak emosi menanggapi rumor bahwa ia memiliki harta senilai IDR 9 trilyun. Dalam konferensi pers di kediamannya (2/11/2016), dia bilang namanya mesti terpampang di antara orang-orang kaya Indonesia versi *Globe Asia*. Nyatanya, tidak ada. SBY menganggap tuduhan itu fitnah.[1] Sebenarnya, setiap tahun majalah bisnis itu menyusun peringkat kekayaan para pebisnis Indonesia. Nama SBY tentu tidak muncul. Karena, dia bukan pebisnis atau pensiunan dari dunia bisnis. Dia adalah pensiunan tentara dan pensiunan presiden. Kalau memasuki dunia bisnis, kemungkinan dia hanya mengikuti jalur tidak berkeringat dari para pensiunan. Di masa tua, sambil mengemong cucu, menjadi komisaris utama di perusahaan-perusahaan tertentu. Kabarnya, setelah pensiun dari presiden, Chairul Tanjung mengangkatnya menjadi komisaris utama salah satu perusahaan miliknya.[2] Dulu, SBY mengangkat "si anak singkong" sebagai menteri kooridinator perekonomian.

1 Lihat https://www.facebook.com/KompasTV/videos/1303384243047138/.

2 https://www.merdeka.com/uang/sby-jadi-komisaris-utama-perusahaan-media-milik-chairul-tanjung.html.

Di era kediktatoran Suharto dan sesudahnya, terdapat banyak pebisnis-cum politisi. Contohnya, Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, periode pertama SBY dan Jokowi saat ini. *Globe Asia* menobatkan JK (Kalla Group) di peringkat 49 orang tajir Indonesia. Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini memiliki kekayaan bersih USD 720 juta. Di masa Orde Baru, Kalla berulang kali menjadi anggota MPR dari Fraksi Golongan Karya. Politisi kaya raya penting lain adalah Aburizal Bakrie, bekas Ketua Umum Partai Golkar (2009-2016) dan figur kunci di Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto menjadi Presiden RI (2014-2019). Saat SBY berkuasa, dia menjadi Menteri Kordinator Perekonomian dan kemudian menjadi Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat. Di masa Orde Baru, Bakrie juga menjadi anggota MPR dari Fraksi Golongan Karya. Dengan kekayaan bersih USD 2.5 miliar, *GlobeAsia* menempatkan Aburizal di urutan ke-8.

Kita bisa memperpanjang daftar nama-nama orang kaya versi *Globe Asia* yang tidak asing dalam politik Indonesia mutakhir. Ada Aksa Mahmud, pemilik Bosowa Grup dan wakil Ketua MPR periode 2004-2009 (peringkat ke-23); Hashim Djojohadikusumo, Asari Group dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, (peringkat ke-43); Rusdi Kirana (peringkat 12), pemilik Lion Group dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebelum menjadi salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pemerintahan Jokowi & JK; Hary Tanoe pernah menjadi ketua dewan pakar Partai Nasdem dan kemudian menjadi Ketua Umum Perindo (peringkat ke-19): Sandiaga Uno, Saratoga Recapital, Dewan Pembina Gerindra, dan kandidat Wakil Gubernur DKI (Peringkat ke-47)

Soeharto memang sudah tumbang, tetapi anak-anaknya masih kaya-raya. Nama-nama mereka tercatat di daftar *Globe Asia*. Yang paling tajir adalah Hutomo Mandala Putra. Tomy mengaku punya banyak aset di luar negeri. Ia juga mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*).[3] Tidak diketahui dia melaporkan asset apa saja miliknya. Tetapi, sesaat setelah kejatuhan Suharto, tersebar luas kabar bahwa Tomy dan beberapa sau-

3 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160915123525-78-158473/tommy-soeharto-akui-banyak-piutang-dan-saham-di-luar-negeri/

daranya memiliki aset tidak bergerak di luar negeri.[4] Kendati merosot dibanding belasan tahun lalu, nilai kekayaan Tomy saat ini masih sekitar USD 655 juta. *Globe Asia* menaruhnya di urutan ke-56. Tomy adalah anggota Dewan Pembina Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Anak Soeharto lain adalah Bambang Trihatmodjo (peringkat ke-124) dan Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut (rangking ke-132). Tidak seperti Tomy, Bambang dan Tutut seperti menghilang dari dunia politik pasca reformasi.

Sejauh ini, kapitalisme kroni (*crony capitalism*) menjadi kata kunci untuk menjelaskan hubungan antara orang-orang superkaya dengan kekuasaan. Mereka menjadi tajir atau semakin tajir karena *hanky-panky* dengan pemegang kekuasaan politik. Para kapitalis kroni dapat menunggangi kekuasaan politik untuk memajukan kepentingan-kepentingan bisnis mereka melalui proses perizinan yang tidak terbuka. Imbalannya, si patron juga bisa memperkaya diri mereka, keluarga, dan kelompoknya, baik dengan atau tanpa turut serta berkeringat dalam aktivitas bisnis. Bersandar pada teori ini, maka penjelasan, misalnya, kejayaan Sudono Salim di masa lalu, karena dilindungi dan dibesarkan oleh Soeharto. Atau, anak-anak Soeharto menjadi kaya raya karena memperoleh aneka kemudahan bisnis saat ayah mereka berkuasa.

Dalam politik tertutup, perburuan rente (*rent seeking*) merajalela. Diperlukan sistem terbuka untuk mengakhirinya. Demokrasi adalah syarat untuk membasmi kroni. Dengan sistem lebih terbuka pasca Suharto, ternyata praktik kroni tidak lenyap. Ini terutama terjadi dalam investasi di sektor-sektor berbasis sumber daya alam (e.g, pertambangan dan perkebunan). Karena mensyaratkan aneka perizinan, sektor ini banyak melahirkan politisi-politisi "papa minta saham", baik di pusat maupun di daerah. Juga, proyek-proyek berbasis APBN dan APBD menjadi sasaran praktik kronisme. Fungsi anggaran DPR/DPRD telah mencetak politisi-cum makelar. Muncul juga spesies pengusaha atau lebih tepat kontrak-

---

4 Dengan cover story Suharto Inc., setahun sesudah kejatuhan Suharto, investigasi *Time* (24 May 1999) menunjukkan bahwa keluarga Suharto memiliki harta kekayaan senilai USD 15 miliar. Saat itu, kekayaan Tomy ditaksir sekitar USD 800 juta. Dia memiliki sebuah kompleks peternakan di Selandia Baru dan lapangan golf (18 lubang) dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris. *Time*, May 24, 1999.

tor 'tim sukses', yang karier bisnisnya seusia siklus pemilu. Sudah banyak anggota DPR/DPRD ditangkap ketika melakukan transaksi paling primitif, sogok-menyogok. Batas antara politisi dan pelaku kriminal menjadi kabur: mereka adalah politisi yang melakukan tindak kriminal. Atau, pelaku kriminal yang sedang berpolitik. Tidak heran, majalah mingguan pro-pasar paling beken di dunia, *the Economist*[5] dalam laporan tentang indeks kapitalisme kroni 2016, menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 di antara negara-negara dunia. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Rusia, Malaysia, Philipina, Singapur, Ukrania, dan Meksiko.

Kendati penjelasan ortodoksi neoliberal soal kroni sebagian ada benarnya, tetapi sama sekali tidak memuaskan. Karena, teori ini hanya menjelaskan buih di permukaan, bukan dinamika di dasar lautan. Buihnya mengandaikan kapitalisme yang benar dan bersih mesti bebas kroni. Seolah problem pokok bukan di sistem ini, tetapi kroni sebagai hama penyakit yang tidak diinginkan. Basmi hama, kapitalisme akan tumbuh sehat.

Ada dua hal yang menjadi motor pertumbuhan kelas kapitalis. *Pertama*, sifat-sifat kapitalisme itu sendiri dan perkembangannya secara historis. Secara umum, bisnis orang-orang kaya membesar melalui "akumulasi kapital". Ini berlangsung melalui dua cara yang saling berhubungan. Kesatu adalah "konsentrasi kapital".[6] Artinya, kekayaan tumbuh dari hasil investasi dan reinvestasi keuntungan dalam kurun waktu yang panjang. Profit dari hasil investasi digunakan untuk investasi lagi guna mengejar profit lebih besar. Dengan kata lain, konsentrasi kapital berarti kelas kapitalis memperluas skala usaha dengan menginvestasikan kembali laba. Sejak investasi dan reinvestasi di sektor apapun mensyaratkan eksploitasi tenaga kerja upahan, maka kekayaan mereka sesungguhnya tumbuh dari kucuran keringat kaum buruh. Pertumbuhan kekayaan baron-baron sawit tentu saja berkat penghisapan brutal terhadap pekerja-pekerja prekarius (rentan) yang bekerja di jutaan areal hektar perkebunan sawit di luar pulau Jawa.

---

5 Lihat edisi May 7th– 13th 2016.

6 Karl Marx. 1976. Capital Volume I. London and New York: Penguin Books.

Tandem konsentrasi adalah “sentralisasi kapital”,[7] sebuah cara cepat untuk menjadikan bisnis kian berotot. Berbeda dengan konsentrasi, sentralisasi melewati proses yang lebih pendek, bahkan seketika. Cara ini lazim dikenal dengan merger dan akuisisi. Saat kapitalisme mengalami krisis, perusahaan-perusahaan yang bangkrut terpaksa atau dipaksa untuk merger dengan atau diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan lebih besar. Hukum besi kompetisi, kelas kapitalis yang kuat makan yang lemah. Itu terjadi, misalnya, dalam krisis kapitalisme 1997/1998. Banyak perusahaan milik kelas kapitalis raksasa ambruk dan beralih ke pemilik baru. Contohnya, Sudono Salim kehilangan Bank Central Asia (BCA), setelah pemerintah mengambil alih bank yang sudah dirintis Om Liem sejak 1950-an itu. Di kemudian hari, pemerintah menjual kepada swasta lain. Kini, pemilik baru atau pemegang saham utama bank itu adalah keluarga Hartono. Sementara keluarga Salim hanya menguasai kurang dari 2 persen saham bank swasta terbesar di Indonesia itu.[8]

Kedua, soal pokok terletak di sistem politik dalam kapitalisme, yakni demokrasi borjuis. Dalam sistem ini, seperti Paul A. Baran dan Paul M. Sweezy bilang, pemilihan umum tidak lebih dari sumber kekuasaan poli-

---

7 Marx, Capital Volume I.

8 Awalnya, karena krisis, pemerintah mengambil alih BCA melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Secara perlahan, BPPN kemudian mendivestasi saham mayoritas BCA yang dikuasainya: 22,5 % melalui IPO (*initial public offering*) pada Mei 2000; 10% pada public offering kedua pada pertengahan 2001; 51% melalui *strategic private placement,* yang dimenangkan Farindo Investments (Mauritus) Ltd pada Maret-April 2002; 1,4% pada 2004 dan; pada 2005, pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelolaan Aset, pengganti BPPN, melepaskan 5,02% saham tersisa. Adapun pemilik lama, keluarga Liem Sioe Liong, per 31 Desember 2002, saham keluarga ini hanya tersisa 2,97%. Pada 2015, Farindo Investments menguasai 47% saham BCA dan sisanya oleh publik. Tetapi, keluarga Hartono, orang terkaya Indonesia versi *Forbes* dan *GlobeAsia*, adalah pemegang saham utama bank dengan total aset senilai 594 trilyun pada 2015 itu. Soalnya, 92,18% saham Farindo Investments dikuasai oleh Alaerka Investment Ltd. Di perusahaan terakhir ini, keluarga Hartono menguasai 100% saham. Di luar itu, dari 53% saham publik di BCA, 2,96% di antara dimiliki oleh para pihak yang memiliki kaitan dengan keluarga Hartono. Keluarga Salim, kini hanya menguasai 1,76% saham milik publik di BCA, melalui salah satu putra Liem, Anthony Salim. Lihat PT Bank Central Asia Tbk. 2003. *Annual Report 2002*; PT Bank Central Asia Tbk. 2016. *Annual Report 2015*.

tik di atas kertas saja.[9] Uang adalah basis kekuasaan sejati. Dengan kata lain, kelas kapitalis adalah pemilik demokrasi borjuis, kendati dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sekalipun. Mereka memiliki pengaruh politik yang jauh lebih kuat dan tidak tertandingi dibanding mayoritas pemilih. Demokrasi borjuis sejatinya mengalienasi mayoritas pemilih. Jadi, anggapan bahwa demokrasi borjuis identik dengan 'setiap orang memiliki hak suara yang sama' sebenarnya hanya khayalan saja.

Jadi, di bawah kapitalisme, pemilu di zaman Orde Baru dan reformasi hanya beda-beda tipis. Yang satu dilakukan oleh rezim otoriter dan yang lain oleh rezim demokrasi elektoral. Di masa Orde Baru, para pemilih, terutama orang miskin, punya hak untuk memilih 'karung' dengan 'kucing' yang sudah ditentukan. Para pemilih datang ke kotak suara dengan jantung dag dig dug, karena dipaksa memilih Golkar. Di masa reformasi, mereka secara formal bebas memilih sesuka hati. Tetapi, mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa menentukan siapa yang semestinya mewakili mereka.

Pemerintahan berbeda yang dilahirkan melalui mekanisme elektoral yang berbeda ternyata tetap tidak kehilangan watak borjuisnya. Kita dapat dengan mudah menyaksikan kenyataan ini dengan menimbang keseluruhan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintahan-pemerintahan pasca Suharto. Semangat dasar paket-paket kebijakan deregulasi Jokowi, misalnya, sama sekali tidak berbeda dari berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang pernah dilakukan Soeharto pada dekade 1980-an: promosi kebijakan investasi yang kian liberal. Sama-sama adalah jawaban terhadap krisis kapitalisme. Suharto ditandai dengan kejatuhan harga minyak bumi dunia dan Jokowi ditandai kejatuhan harga berbagai komoditas. Di bawah kontrol pasar, mereka pada dasarnya memiliki orientasi kebijakan yang sama, apapun jargon yang mereka jual. Kebijakan-kebijakan makro ekonomi mereka sama-sama menekankan pertumbuhan pada skala nasional dan perburuan profit yang tinggi pada skala perusahaan-perusahaan. Mereka dipaksa membuat kebijakan pro investasi dan perdagangan di mana kemudahan arus modal, barang, dan manusia harus terjadi seluas-luasnya. Mereka tunduk kepada kenyataan bahwa roda pemerintahan hanya dapat berjalan berkat kebijakan-kebijakan yang memu-

9 Paul A. Baran and Paul M. Sweezy. 1966. *Monopoly Capital*. New York and London: Motnhly Review.

ngkinkan sirkulasi modal terjadi. Mungkin yang membedakan hanya satu: sejauh ini Jokowi seperti bebas dari isu kronisme, berbeda dengan para presiden sebelumnya, entah rumor atau benar-benar terjadi. Dus, transisi politik dari rezim militer (1966-1998) ke rezim demokrasi (1998-sekarang) sebenarnya hanya mengukuhkan watak borjuis dari sistem politik di bawah kapitalisme.

Dengan konteks tersebut, maka keikut-sertaan para *tycoon* dalam kontestasi kekuasaan tidak bisa direduksi sebagai soal ambisi pribadi semata. Misalnya, ambisi untuk melindungi kepentingan bisnis pribadi atau klik mereka. Pada derajat tertentu, boleh jadi itu benar ada. Tetapi penjelasan semacam ini gagal menangkap dinamika di dalam lautan. Sebaliknya, penjelasan mesti bertolak dari argumen yang lebih mendasar. *Pertama*, bahwa keterlibatan mereka adalah bagian dari usaha kelas kapitalis untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan politik guna melanggengkan sistem tersebut atau mencegah kebangkrutan sistem dari ancaman kekuatan-kekuatan anti-kapital. Keterlibatan mereka merupakan usaha memastikan bahwa negara kapitalis tidak ditunggangi oleh kekuatan anti-kapital. Kita tahu, akumulasi mensyaratkan eksploitasi buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan sumber daya yang terkandung di baliknya sebagai alat produksi. Buruh dan petani sebagai subyek politik alternatif oleh karena itu harus terus-menerus dihegemoni, baik melalui kekerasan maupun *consent,* agar mencegah mereka dari perlawanan. Dengan demikian, masuknya kelas orang kaya di dalam politik mesti dijelaskan sebagai bagian dari kepentingan kelas kapitalis untuk memenangkan perjuangan kelas (*class struggle*) menghadapi kelas pekerja. Dengan merebut kekuasaan politik, maka mereka dapat melestarikan *marwah negara kapitalis sebagai alat kediktatoran kaum borjuis*.

Kedua, fakta bahwa mereka juga 'berkelahi' satu sama lain di panggung politik harus dijelaskan sebagai bagian dari intra perjuangan kelas (*intra-class struggle*) sesama fraksi kelas kapitalis. Pertaruangan semacam ini lebih untuk memajukan kepentingan-kepentingan spesifik di antara mereka. Mereka mendirikan atau memasuki partai politik berbeda, dengan jargon-jargon pembeda seperti nasionalisme, populisme, taqwaisme, karyaisme, dsb. Tetapi, itu hanya topeng untuk memajukan kepentingan-kepentingan khusus mereka dalam jangka pendek. Sejatinya, mereka selalu

berusaha untuk melindungi kepentingan umum atau bersama mereka, yakni keberlanjutan sistem kapitalisme.

Kontradiksi

Kapitalisme adalah sistem yang kontradiktif. Segelintir orang kaya raya dan mayoritas lain hidup melarat. Dari 255 juta penduduk Indonesia pada 2016, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 28 juta orang miskin.[10] Tentu saja, ada puluhan juta lain yang bertahan hidup dengan posisi sedikit di atas garis kemiskinan menurut kriteria BPS. Kalau standar kemiskinan digeser sedikit lebih tinggi, mungkin ada 100 juta orang di Indonesia harus bekerja keras untuk hidup dengan nilai konsumsi sekitar USD 2 setiap hari.[11] Mereka menjadi sangat rentan terutama ketika krisis kapitalisme menghajar. Seperti pada akhir 1990an, BPS menunjukkan bahwa pada 1998, jumlah orang miskin mencapai 49 juta jiwa, melonjak dari 34.01 juta pada prakrisis 1996.

Tetapi, sejak kapitalisme adalah sistem hubungan eksploitasi, kita mesti memperhatikan kontradiksi dasarnya, yakni kelas kapitalis mengeksploitasi kelas pekerja aktif (KPA), baik di sektor-sektor produktif, maupun non-produktif. Dalam 25 tahun terakhir, kita menyaksikan jumlah kelas pekerja aktif Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (lihat Tabel). Di balik perkembangan itu, sudah banyak studi non-Marxist tentang upah buruh murah dalam 3-4 dasawarsa ini yang menjadi fondasi sukses perkembangan kapitalisme di tanah air. Laporan-laporan media masa, baik internasional, nasional, dan lokal, juga melimpah ruah dengan memotret kondisi kelas pekerja yang buruk. Setiap tahun, kita menyaksikan perjuangan kaum buruh untuk memperoleh upah mimimum yang layak. Ini cermin dari eksploitasi yang mereka hadapi. Survei yang dilakukan BPS menunjukkan, pada 2015, 51, 71 persen dari kelas pekerja di Indonesia membawa pulang penghasilan bersih di bawah upah minimum propinsi (UMP). Tentu saja, semuanya membantu kita untuk mengerti sifat-sifat eksploitasi dari kapitalisme.

Tetapi, yang tidak pernah muncul dalam literatur-literatur adalah bagaima-

---

10 Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. semester pertama 2016.

11 Lihat *The Jakarta Post*, 8 October 2015.

na mengerti eksploitasi dari sudut teori Marxisme. Dalam kapitalisme, hubungan antara kelas kapitalis dan kelas buruh berbasis pada transaksi jual beli tenaga kerja (*labor power*) secara suka rela. Buruh menjual tenaga kerja kepada kelas kapitalis dalam periode waktu tertentu dengan imbalan upah. Semestinya, upah setara dengan nilai kebutuhan fisik/material yang diperlukan oleh buruh untuk mereproduksi kemampuan fisik dan mentalnya untuk dapat kembali kerja. Marx mengaitkan hal ini dengan ide tentang "waktu kerja yang diniscayakan" (*necessary labor time*). Kebutuhan material itu sendiri terdiri dari makanan, perumahan, dan lain-lain. Masalahnya, untuk mengejar profit sebanyak-banyaknya, kelas kapitalis mempekerjakan buruh untuk bekerja lebih lama dari dari waktu kerja yang diniscayakan. Dengan kata lain, kelas kapitalis mengambil kelebihan waktu kerja yang dilakukan oleh kelas pekerja tanpa membayar sama sekali.

Bagaimana melihatnya? Dari data resmi, berdasarkan hasil survey tahunan, yang disediakan BPS mengenai industri manufaktur skala besar dan menengah, kita bisa menemukan tingkat eksploitasi itu. Menafsirkan data-data tersebut dalam kerangka "nilai tenaga kerja" (*the value of labor-power*), yakni, v/(s + v) (v adalah variabel kapital (upah) dan s adalah nilai-lebih (*surplus-value*)), tingkat eksploitasi itu terlihat jelas. Figur 1, menggambarkan trend upah yang menurun dalam industri manufaktur sebagai persentase terhadap *nilai tenaga kerja* kaum buruh dari keseluruhan nilai komoditi yang mereka hasilkan setelah dipangkas dengan semua ongkos produksi (konstan kapital). Pada 2015 merupakan tingkat eksploitasi paling ekstrim, yakni, upah kelas pekerja di sektor ini hanya 2 persen dari total nilai tenaga kerja yang mereka jual kepada kelas kapitalis. Dengan kata lain, pada tahun itu, kelas kapitalis merampas 98 persen dari nilai tenaga kerja buruh, sebagai nilai-lebih. Dengan kata lain, 98 persen adalah kerja buruh yang tidak dibayar. Menerjemahkan persentase ini ke dalam jam kerja seminggu, katakanlah 40 jam sesuai UU ketenagakerjaan, maka 0.2×40. Hasilnya, para pekerja di sektor manufaktur Indonesia setiap minggu bekerja selama 8 jam untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka dalam bentuk upah. Sementara 32 jam tersisa adalah kerja tanpa upah. Dengan kata lain, kelas kapitalis menguras keringat kaum buruh selama 32 jam kerja tanpa upah sama sekali. Ini yang disebut dengan kelebihan jam kerja yang menghasilkan nilai-lebih.

Persentase kelas pekerja aktif di Indonesia berdasarkan sektor ekonomi (1990 dan 2015)

Sektor	1990	2015
Pertanian	23,15	7,40
Pertambangan	1,22	1,69
Manufaktur	20,27	23,69
Listrik, gas dan air	0,56	0,64
Konstruksi	7,99	6,42
Perdagangan, restaurant dan hotel	5,54	16,15
Angkutan, pergudangan, komunikasi	4,37	5,21
Keuangan, asuransi	2,11	6,31
Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan	34,64	32,45
Belum jelas batasan	0,11	0
Total	100	100
Dalam 000	20.793	46.612

Sumber: Diolah dari BPS

Apa basis material eksploitasi buruh murah? *Pertama,* karena dalam kapitalisme, kelas pekerja dapat dibedakan antara kelas pekerja aktif (KPA), atau *active army*, dan tenaga kerja cadangan (TKC), atau *reserve army of labor*, maka salah satu kondisi utama yang memungkinkan eksploitasi buruh murah adalah tersedianya limpahan TKC di perkotaan dan perdesaan.[12] Teori akumulasi bilang semakin besar rasio TKC terhadap kelas pe-

12 Dengan kelas buruh adalah seseorang yang menjual tenaga kerja secara sukarela dengan imbalan upah, ide tentang TKC sedikit lebih krusial. Marx tidak melihat TKC dalam kerangka pertumbuhan penduduk secara natural. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan dinamika akumulasi kapital. Baginya, investasi mensyaratkan kebutuhan tenaga kerja dengan menyerap lebih banyak orang untuk bekerja. Dengan kata lain, investasi berarti penciptaan lapangan pekerja. Sebaliknya, disebabkan oleh tekanan

kerja aktif, semakin menekan posisi tawar kelas pekerja aktif di hadapan kelas kapitalis. Per teori, penganggur, lumpenproletariat, pekerja sektor informal, dan kaum tani di perdesaan adalah TKC. Di perkotaan, TKC terpenting adalah pekerja di sektor informal (pedagang-pedagang dan aneka usaha berskala kecil). Kehidupan mereka bisa menjadi lebih buruk, terutama dalam momen-momen penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur, real estate, dan aneka investasi berbasis tanah yang lain. Di perdesaan, TKC terdiri dari semua lapisan petani: petani pemilik dengan lahan sempit, petani penggarap, dan buruh tani. TKC ini sangat rentan terhadap investasi di sektor-sektor industri keruk yang rakus tanah dan menyingkirkan mereka.

Di tengah kesulitan untuk memastikan angka jumlah TKC berdasarkan data statistik resmi, beberapa sarjana berusaha mengerti ide tentang TKC ini, dengan menggunakan konsep ILO tentang "pekerjaan rentan" (*vulnerable employment*).[13] Secara umum, "pekerja rentan" adalah orang yang berkerja tidak dalam kerangka hubungan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja berbasis upah, lebih bersifat informal, dan kondisi yang prekarius.[14] BPS

---

pasar untuk meningkatkan produktivitas, akumulasi kapital mensyaratkan perbaikan teknik dalam produksi. Implikasinya, kebutuhan kuantitas tenaga kerja merosot. Ini dengan cepat mengakibatkan pengangguran. Karena orang yang sebelumnya sudah bekerja terpaksa meninggalkan tempat kerja. Orang-orang seperti ini menjadi TKC, karena mereka terpaksa mencari pekerjaan. Marx menyebut ini "TKC mengambang (*floating*)". Segmen penduduk yang lain sebagai anggota TKC adalah "Laten", yakni fraksi penduduk di dalam masyarakat yang berusaha untuk menyambung hidup di bawah reproduksi non-kapitalis, seperti para petani kecil atau produsen independen, dan massa petani tradisonal. Mereka ini berpotensi untuk meninggalkan sector-sektor pertanian yang terbelakang dan mencari pekerjaan-pekerjaan dengan upah tetap dan pasti. Kemudian, Marx menyebut TKC "stagnant", yakni mereka bekerja tetapi tidak secara teratur. Misalnya, pekerja paruh waktu yang bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk, seperti waktu kerja yang panjang, upah yang rendah, dan tempat kerja yang sama sekali tidak aman. Terakhir, di bagian kelas paling bawah dari TKC adalah kaum yang hidup dalam kondisi kehidupan yang sangat miskin (*pauperism*) lumpenproletariat, seperti para pelaku kejahatan jalanan dan prostitusi kelas bawah juga tergolong dalam lapisan ini.

13 Lihat David Neilson and Thomas Stubbs. 2011. "Relative Surplus Population and Uneven Development in the Neoliberal Era: Theory and empirical application." *Capital & Class*, 35(3): 435-453

14 BPS menyebut pekerjaan rentan ditandai dengan ketiadaan kontrak kerja, upah

menyebut pekerja rentan terdiri dari penduduk 15+ yang “berusaha sendiri”, “berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar”, “pekerja bebas”, dan “pekerja keluarga”. Menggunakan kerangka ini, berdasarkan data BPS, dari 120,8 juta penduduk 15+ tahun yang sedang bekerja, tampak jumlah pekerja rentan di tanah air per Februari 2015 mencapai 70,01 juta atau sekitar 57, 94 persen. Dalam waktu yang sama, jumlah kelas pekerja aktif sebanyak 46, 6 juta (lihat Tabel), atau 38, 57 persen.[15] Ini memberikan gambaran kasar bahwa posisi tawar kelas pekerja aktif sangat lemah di hadapan kelas kapitalis.

Bagaimana dengan teritori dengan keadaan sebaliknya, Mmsalnya, Jakarta? Penduduk 15+ dengan status sebagai “pekerja rentan” (*vulnerable employee*) di sana sebanyak 1,3 juta atau 27,30 persen dari total penduduk 15+ yang bekerja. Penduduk 15+ yang berstatus buruh/karyawan.pegawai mencapai 3, 45 juta atau 68,03 persen pada Februari 2015.[16] Tetapi *share* pekerja di sektor manufaktur terhadap keseluruhan kelas pekerja aktif di Jakarta hanya 19.66 persen, jauh di bawah sektor jasa sekitar 79.58 persen. Menghadapi situasi seperti ini, di mana posisi tawar kelas pekerja aktif lebih tinggi, kelas kapitalis selalu tidak kehilangan akal. Jika muncul tekanan untuk menaikkan upah, maka relokasi industri ke teritori dengan upah rendah dan memiliki rasio TKC lebih besar menjadi pilihan. Strategi *spasial fix* semacam ini muncul luas beberapa tahun terakhir. Saat terjadi aksi-aksi buruh di Jakarta dan Banten menuntut kenaikan upah, sejumlah media melaporkan bahwa beberapa perusahaan merencanakan memindahkan pabriknya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana umum minimum regional jauh lebih rendah (*Gatra*, 5 Desember 2012; *Detik.com*, 17 Maret 2014).

Kedua, di bawah rezim akumulasi neoliberal yang mensyaratkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, kelas pekerja aktif menjadi sangat rentan terusir dari tempat kerja. Itu terjadi karena kontrak-kontrak kerja jangka pendek,

---

rendah, produktivitas rendah, minimnya perlindungan/jaminan sosial, dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan hak-hak mendasar pekerja.

15 Badan Pusat Statistik. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja* Februari 2015. Jakarta BPS, p, 140.

16 *bid*, 225.

kerja paruh waktu, kerja shift, kerja di waktu malam dan di akhir pekan, dan pekerjaan-pekerjaan musiman. Bukan hanya itu, di bawah tekanan pasar, sesama kelas kapitalis selalu berkompetisi untuk meningkatkan produktivitas. Untuk itu, inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih produktif tetapi hemat tenaga kerja selalu menjadi pilihan. Akibatnya, pengurangan kuantitas tenaga kerja tidak bisa dihindari. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa kelas pekerja aktif dapat dengan aman terus bekerja di bawah rezim akumulasi neoliberal ini. Apalagi di saat krisis kapitalisme, kaum buruh terpaksa harus membayar ongkosnya, yakni, terdepak dari tempat kerja. Krisis akhir 1990an adalah contoh terang benderang. Data resmi BPS menunjukkan bahwa jumlah kelas pekerja aktif di Indonesia sudah mencapai 30, 2 juta pada 1997. Gara-gara krisis, angka tersebut merosot dari tahun ke tahun dan mencapai titik terendah 23,8 juta pada 2003. Tidak kurang dari 6,4 juta pekerja terlempar dari pekerjaan formal. Diperlukan waktu lebih dari 10 tahun sesudah krisis akhir 1990an, jumlah kelas pekerja aktif dapat kembali menembus angka 30 juta, yakni sejak 2010.

Sumber: Diolah dari BPS (berbagai tahun)
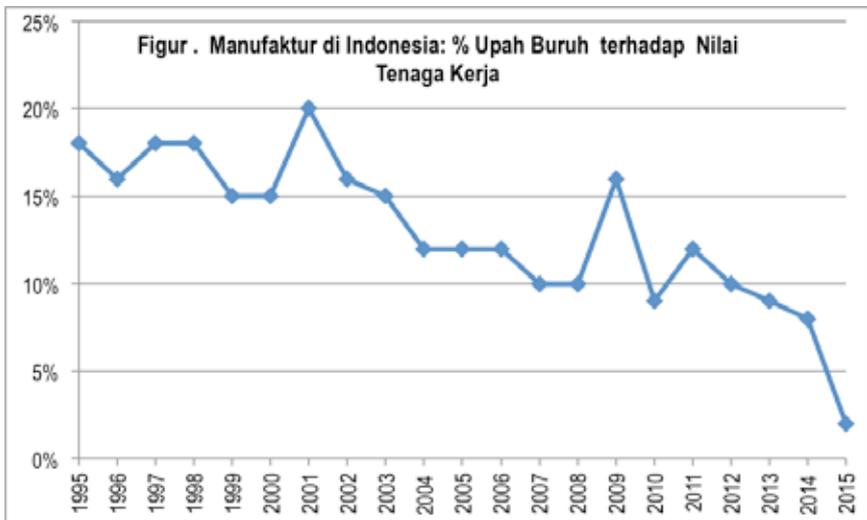
Rasisme Sebagai Jalan Keluar

Meninggalkan puluhan juta orang teralienasi karena eksploitasi, pengangguran, dan kemiskinan, sesungguhnya kapitalisme memelihara bom waktu. Sayangnya, kendati mayoritas kelas pekerja merasakan keterpurukan, mereka tidak memahami kapitalisme sebagai akar penyebab. Sebagian bahkan mungkin menerimanya sebagai takdir. Ketidak-tahuan tentang akar masalah menjadi kian dalam karena berbagai institusi di dalam masyarakat kapitalis – partai politik, pendidikan – dengan satu dan lain cara mereproduksi kesadaran naif. Yang paling manjur adalah kesadaran identitas agama dan suku. Para politisi borjuis mengeksploitasi identitas sebagai ideologi politik untuk perebutan kekuasaan. Lembaga pendidikan mereproduksi pengetahuan dengan mengesensialkan identitas agama dan suku. Ujungnya, soal-soal kemasyarakatan yang muncul karena eksploitasi hubungan kelas dimanipulasi sebagai soal identitas.

Indonesia memiliki pengalaman panjang soal semacam ini. Saat kapitalisme global dalam proses konsolidasi paling awal, VOC, usaha dagang raksasa dunia saat itu, memolopori pembantaian warga keturunan Tionghoa di Batavia pada 1740.[17] Berawal dari kebijakan Gubernur-Jenderal J.P. Coen pada dekade-dekade awal abad 17, orang-orang Tionghoa menjadi pelaku ekonomi penting sebagai pedagang dan pengusaha. Menjadi kontraktor perkebunan tebu dan pabrik gula di Batavia dan sekitarnya, para pengusaha mengeruk keuntungan dari eksploitasi buruh murah. Untuk itu, dengan mempekerjakan sebagian pekerja migran secara ilegal dari Tiongkok yang mengalir deras sejak akhir abad 17, para operator perkebunan menyogok aparat korup Belanda. Upah pekerja migran menjadi sangat murah, karena status ilegal. Melubernya migran yang menganggur juga ikut menekan harga tenaga kerja.

Krisis gula di pasar global membuat industri ini bangkrut. Pengangguran dan kejahatan meningkat di Batavia. Otoritas VOC di kota itu panik dan ingin mengirim para migran yang kehilangan pekerjaan ke Sri Langka.

17 Tentang pembantaian ini lihat A.R.T. Kemasang. 1982. "The 1740 Massacre of Chinese in Java: Curtain raiser for the Dutch plantation economy." Bulletin of concerned Asian 14(1): 61; A.R.T. Kemasang. 1985. "How Dutch Colonialism Foreclosed a Domestic Bourgeoisie in Java: The 1740 Chinese massacres reappraised." Review IX (1): 57-80.

Beredar rumor, dalam pelayaran ke Sri Langka, mereka akan "disekolahkan" (dilepaskan ke laut). Khawatir benar terjadi, orang-orang Cina yang sudah melarat berontak. Belanda yang unggul dalam senjata memukul balik, termasuk mengerahkan kaum budak di Batavia sebagai pemukul. Hasilnya, tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa mati sia-sia.

Selama masa Orde Baru, boleh dibilang soal rasisme ditekan sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran pembangunan yang kapitalistik. Ini mengantarkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Pertengahan 1990an, Bank Dunia lantas memberi stempel Indonesia sebagai "newly industrializing economies (NIEs)", bersama Malaysia dan Thailand. Saat krisis kapitalisme menghantam Asia Timur dan Tenggara di akhir 1990an, Indonesia mengalami dampak paling buruk. Pabrik tutup, kredit macet, pengangguran meningkat, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak.

Gagal memahami sebagai soal yang tertanam (*endogenous*) dalam kapitalisme, krisis justru dipandang sebagai soal rasial. Hanya karena sejumlah konglomerat keturunan Tionghoa menguasai dunia bisnis di tanah air, seolah problem pokok berasal dari warga keturunan Tionghoa. Krisis berujung kekerasan rasial: pembunuhan, pemerkosaan, dan aneka kekerasan lain terhadap warga Tionghoa terjadi terutama di Jakarta. Krisis juga meninggalkan konflik dengan dalih agama di sejumlah daerah (Poso, Ambon, Ternate). Rata-rata para pelaku yang terlibat dalam kekerasan-kekerasan di jalan adalah mereka yang tersisih oleh kapitalisme. Mereka adalah kelas lumpen-proletariat atau "dangerous class".[18] Umumnya, di antara mereka adalah penganggur dan pelaku kriminal jalanan. Orang-orang ini mungkin saja memiliki kemampuan untuk bekerja di sektor formal, tetapi tidak bisa melakukannya karena ketiadaan lapangan pekerjaan. Mereka rela menyabung nyawa dalam kekerasan-kekerasan rasial lebih karena ketidak-tahuan terhadap akar masalah. Apa yang digambarkan Gerry van Klinken sebagai perang kota kecil, dalam kasus Poso dan Ambon,[19] menurut hemat

18 Karl Marx and Frederick Engels. 1848. *The Manifesto of Communist Party*. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/.

19 Gerry van Klinken. 2007. *Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars*. London: Routledge.

saya tidak lebih dari perang sesama kaum miskin dengan korban sesama mereka sendiri.

Tetapi, kekerasan semacam juga menyertakan 'lumpen- parolatriat kelas atas'. Siapa itu? Di *Class Struggle in France*, misalnya, Marx berbicara tentang aristokrasi keuangan (*finance aristocracy*), yang maknanya bukan berkaitan dengan kapital uang (*finance capital*) di dalam kelembagaan resmi kapitalisme. Tetapi, aristokrasi keuangan dalam pengertian orang-orang yang mengeruk keuntungan dengan rakus dan kejam, terutama terhadap kaum yang lemah. Karakter mereka sebenarnya identik dengan para perampok, atau perampok itu sendiri, yakni perampok dari kelas atas. Mereka menumpuk kekayaan tidak melalui kegiatan produksi, sebagaimana layaknya dalam sistem kapitalisme. Apa yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal.[20] Umumnya mereka membangun organisasi massa berbasis suku atau bahkan bertopeng agama. Sejak Orde Baru, mereka berusaha mengeruk uang dengan proteksi atau tekanan terhadap para pengelola hiburan malam. Karena mereka pada umumnya memiliki akses dan kaitan ke kekuasaan, kerap para elit borjuis yang terlibat dalam perebutan kekuasaan jangka pendek menggunakan mereka dalam tindak-tindak kekerasan massa secara konspiratif untuk memukul lawan. Banyak kerusuhan atau kekerasan rasial di tanah air, terutama sejak Orde Baru, yang melibatkan mereka sebenarnya berhubungan dengan konflik intra elit borjuis.

Hari-hari ini, di tengah hiruk-pikuk politik elektoral di Jakarta, kita menyaksikan kartu identitas dieksploitasi sedemikian dalam. Pernyataan Ahok dengan mengutip Surat Al-Maidah 51 telah digoreng sedemikian rupa untuk mengeliminasinya. Tetapi, problem dasarnya adalah ini: Jakarta bukan hanya etalase kemajuan Indonesia, tetapi sekaligus cermin kemajuan yang tidak berimbang (*uneven development*). Sebagai kota metropolitan, Jakarta melayani perusahaan-perusahaan raksasa (industri,

---

20 Tampaknya, Marx menggunakan sebutan aristokrasi keuangan untuk menekankan bahwa fungsi mereka untuk mengeruk kekayaan tidak berbeda dengan institusi kapital uang seperti bank. Di mana kekayaan tumbuh dan beranak pinak bukan melalui produksi tetapi melalui penghisapan dengan cara lain, seperti menarik bunga dari mekanisme pinjaman. Bedanya, lembaga-lembaga kapital uang melakukannya secara resmi melalui pengaturan pemerintah, para aristokrat lumpenproletariat ini melakukannya berdasarkan hukum rimba. Atau paling tidak, mereka bergerak di area abu-abu, di mana batas antara hukum rimba dan hukum resmi sangat kabur.

keuangan, dan dagang) dan kelas-kelas pekerja dengan keahlian yang tinggi. Ini mensyaratkan akumulasi berbasis investasi di sektor properti (perkantoran, perhotelan, ritel, kompleks tempat tinggal eksklusif/apartemen, dll) dan infrastruktur sebagai prioritas. Resikonya, penyingkiran terhadap para pekerja rentan di sektor informal tetapi juga borjuasi skala kecil menjadi pemandangan menonjol, termasuk yang dilakukan Ahok dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memiliki 1, 2 juta pekerja rentan, dan lebih dari 450 ribu pengangur (Februari 2015), Jakarta secara obyektif menyimpan "api dalam sekam". Sejak tidak ada partai politik yang merepresentasikan kepentingan kelas mereka, maka lawan-lawan Ahok, sesama politisi borjuis, dapat dengan licik mengkanalisasi sentimen identitas lautan massa yang tersungkur karena pertumbuhan cepat kapitalisme di ibukota.

Padahal, kecuali mungkin dalam gaya berkomunikasi, sama sekali tidak ada jaminan bahwa para pesaing Ahok di Pilkada akan lebih baik. Seperti juga Ahok, mereka akan melayani kepentingan kelas kapitalis sebaik-baiknya. Tetapi, yang paling tidak beradab adalah setelah 276 tahun pembantaian oleh VOC, fraksi-fraksi politisi borjuis dengan secara licin mengorkestrasi kebangkitan rasialisme di Batavia masa kini dengan sangat vulgar.***

Toronto, 15 November 2016

Sumber: http://indoprogress.com/2016/11/kontradiksi-kapitalisme-dan-rasisme/

Kelas Menengah Islam: Wajah Keagamaan Tanpa Ide Populis

Eko Prasetyo

> *Mereka adalah kelompok orang yang bila berkumpul membahayakan, bila berpisah menguntungkan* (Ali RA)
>
> *Orang-orang kaya biasanya merupakan sahabat para tiran, karena mereka mampu membeli kebebasan; sedangkan kaum melarat tak segan-segan menjual kebebasan mereka* (JJ Rousseau)

KINI kita tiba dalam arus putaran sejarah yang genting. Umat telah jadi kekuatan massa yang 'seolah-olah' sadar dan yakin. Pada siapa saja yang dikatakan kafir dan pada orang yang disebut menghina. Persis ketika kehormatan itu tersinggung maka umat bisa turun dan mengaliri jalanan. Aksi Bela Islam membawa bukti yang meyakinkan. Ratusan ribuan umat menggenangi jalan protokol dan mengelilingi Monas. Diperintah oleh sebuah fatwa yang dituangkan dalam suasana yang panas: kompetisi politik menjelang Pilkada. Guncangan itu membuat banyak kalangan harus saling bertemu, berunding dan menegoisasikan kesepakatan. Soal aksi harus berjalan damai, tentang pengusutan harus tuntas hingga ditangkapnya sejumlah orang yang kena tuduhan makar. Politik kini menemukan suasana baru: bertarung kekuatan dengan memanfaatkan aksi massa. Ormas seperti FPI meroket dan bahkan pimpinannya khutbah di depan Presiden. Sejajar dengan itu, banyak analisis yang melihat ini adalah gerakan yang harus diakui hasil dari kumpulan situasi sosial yang kompleks: kekalahan orang miskin, marginalisasi buruh hingga naiknya fundamentalisme. Saya tak membantah tapi punya pandangan sedikit berbeda. Saya melihat ini adalah gerakan yang diawali dari sebuah harapan yang mau karam.

Harapan itu mula-mula tumbuh saat Orde Baru tumbang. Keyakinan bahwa Partai Islam akan naik popularitasnya dan banyak orang akan bergabung di dalamnya. Kenyataannya ternyata tidak demikian! Partai Politik Islam kian lama menjalankan aktivitas serupa dengan partai lain. Politis-

inya korup dengan pengurus yang serakah. Juga gagasan politik yang dibangunnya hampir tak ada: mengikuti irama pemilu dengan program yang sejajar dengan kepentingan para penguasa politik. Tak muncul politisi Islam yang segar, cerdas dan sederhana. Kumpulan politisi ini tampak hanya bicara di muka televisi, sesekali berdebat dan tiba waktu Ramadhan memberi ceramah. Pada soal terorisme, jarang mereka bicara apalagi soal seperti upah dan penggusuran. Para politisi ini tak mampu menjangkau harapan massa dengan guncangan tindakan yang bermakna. Lama-kelamaan serupa dengan rombongan sirkus yang muncul pada momen pilkada, pemilu dan bencana. Diam-diam umat merasa tak butuh mereka dan bisa jadi menganggapnya hanya jadi beban sejarah. Petunjuk sempurna mengenai itu ada pada Pemilu: suara Partai Islam tak sebanyak massa Islam.

Menyandarkan harapan pada ormas Agama yang raksasa dengan usia tua juga sama saja! Organisasi ini terlampau mapan. Birokratisasi melanda pada mesin ormas yang sudah punya segalanya. Para ketua dipilih dengan mekanisme mirip Pemilu. Mereka jadi sosok elite: bicara dari pertemuan besar, bertamu ke Istana hingga datang hanya pada perhelatan raksasa. Retorika mereka jadi terlampau sopan, penuh basa-basi dengan dibawakan melalui gaya yang halus, aristokratik, dengan fokus yang abstrak. Lebih-lebih banyak mantan pejabat duduk sebagai pengurus dengan cakupan wewenang yang tinggi. Para aktivis di kampung yang menghidupkan kegiatan keagamaan tak banyak punya peran: mereka seperti tim sorak. Didatangkan dalam perhelatan muktamar dan suaranya hanya tercetak pada kertas suara. Saat mereka kena gusur, biaya pendidikan mahal, dan dikenai PHK: tak banyak yang diperbuat oleh para pengurus. Langka sekali Ormas Keagamaan besar membela kadernya yang kena gusur atau kena PHK. Organisasi itu jadi mirip rumah yang nyaman untuk para pengurus dengan dikelola mirip badan usaha. Faedahnya hanya untuk pengurus, penguasa dan pengusaha.

Di hadapkan pada situasi seperti itulah: sesungguhnya umat sedang kecewa. Tak memiliki kebanggaan pada ormas maupun partai yang berjuang atas nama mereka. Pada saat bersamaan, muncullah ormas keagamaan yang lebih informal, radikal dan hidup di perkotaan. Bangunan kesadaran agama yang disusun oleh ormas-ormas baru: FPI, MMI, MIUMI hingga HTI: dimana Islam adalah ‘segalanya’. Ormas yang menebarkan keyakinan

kalau Islam itu unggul untuk soal apa saja: kesejahteraan, keadilan hingga kekuasaan. Mula-mula praktik keagamaan mereka selalu penuh dengan kritik atas tatanan: demokrasi, HAM hingga pluralisme. Dan secara piawai mereka merujuk bukti sosial yang sulit disanggah: kemiskinan dimana-mana, kesenjangan terus menganga dan keadilan hanya janji. Tanpa ragu ormas ini ada yang mencoba melayani kebutuhan itu semua: mendirikan pendidikan murah, membuat layanan kesehatan yang bisa dijangkau dan mendengar semua keluhan. Pada urusan hukum mereka kadang mengabaikan wewenang aparat: meyerbu tempat perjudian, menghakimi para penjudi hingga menekan praktik jual beli minuman keras. Upaya ini disambut dengan antusias oleh anak-anak muda yang merasa persoalan pengangguran, ketiadaan kesempatan kerja dan akses pendidikan mahal disebabkan oleh sistem yang 'padat maksiat'. Cara pandang ini diikuti oleh penyelenggaraan jasa pendidikan murah, layanan untuk orang miskin hingga unit penanganan tanggap bencana. Ormas Islam hidup bukan dengan bekal ide Syariah melulu, tapi juga mahir mengakumulasi dana zakat, infak, shodaqah maupun wakaf untuk mengatasi krisis ekonomi.

Setidaknya banyak ormas Islam-di luar NU dan Muhammadiyah- mencoba mengembangkan kecakapan ini dan berhasil mengakumulasi dana dalam jumlah raksasa. Organisasi filantropi adalah salah satu elemen kekuatan Islam yang tumbuh, berkembang dan besar pasca Reformasi. Dikelola oleh kelompok Islamis yang punya hubungan, relas,i dan bahkan beranggotakan aktivis dari ormas-ormas Islam di luar organisasi resmi Islam. Penggalangan bantuan yang semula untuk solidaritas Internasional beranjak pada isu tanggap bencana hingga penanganan kemiskinan. Para 'Islamis' mula-mula ingin menjawab krisis ekonomi, lama kelamaan meneguhkan diri sebagai organisasi filantropi modern. Organisasi yang memberi petunjuk membesarnya kekuatan kelas menengah Islam sekaligus wujud dari kehendak untuk meletakkan Islam dalam formasi struktur sosial yang lebih modern. Tabel di bawah ini memberi bukti kemahiran mengelola zakat yang terhimpun oleh organisasi Islam di luar wadah NU dan Muhammadiyah:

Penerimaan Total Dana Dompet Dhua-fa (Rp Miliar)	**Penerimaan Total Dana Baznas (Rp Milliar)**	**Penerimaan Total Dana Rumah Zakat (Rp Milar)**	**Total Donatur Rumah Zakat**
Tahun 2010: 191.171	Tahun 2010: 33.13	Tahun 2009: 107.33	2009: 68,410
Tahun 2011: 186.87	Tahun 2011: 44.17	Tahun 2010: 135.08	2010: 84,379
Tahun 2012: 150.74	Tahun 2012: 56.84	Tahun 2011: 145.87	2011: 99,248
	Tahun 2013: 73.25	Tahun 2012: 177.81	2012: 120,655
	Tahun 2014: 21.75	Tahun 2013: 186.57	2013: 136,908

Akumulasi dana besar ini-sekali lagi- memberi petunjuk ampuh membesarnya kekuatan ekonomi kelas menengah muslim. Dipukul oleh resesi ekonomi '98 tak membuat pertumbuhan kelas menengah itu tersendat. Sensus Penduduk 2010 menunjukkan 87 persen masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dimana terdapat kelompok masyarakat dengan pengeluaran US$ 2-20 atau Rp 24-240 ribu/hari yang jumlahnya lebih dari 130 juta jiwa. Himpunan dana yang secara ideologis merupakan praktik ritual kini jadi landasan akumulasi yang besar: jika tiap masjid memiliki panitia zakat maka ada 643.000 masjid yang beroperasi[21]. Jumlah fantastis yang kini menjadi sasaran dakwah dan mobilisasi dana kaum Islamis. Tapi seperti watak kelas menengah pada umumnya: meski punya pendapatan yang besar, lebih berpendidikan dengan posisi sosial yang lebih baik, tapi mereka lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat 'material'. Lapisan inilah yang memburu gaya hidup yang sesuai Syariah melalui konsumsi semua produk-produk berlabel Islam. Kegandrungan mereka untuk mengonsumsi apapun sejajar dengan upaya mereka untuk terus-menerus

21 Ini data tahun 2000 dan penjelasan tentang Organisasi Filantropi ini dapat dibaca pada buku yang menarik: Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konstentasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Gading, 2017

menarik garis batas dari strata yang lebih rendah dari masyarakatnya. Lebih rendah itu bisa berkait dengan ‘perbedaan keyakinan’, ‘perbedaan pandangan’ hingga ‘perbedaan gaya hidup’. Sebagai seorang muslim tak bisa hanya ‘berbusana dan berbicara’ tapi juga ‘mengonsumsi’ apa saja yang identik dengan peningkatan kualitas ‘Iman’. Iman yang letaknya ada pada ekspresi keyakinan ke publik, pandangan atas diri yang lebih saleh sekaligus ikut meyakini sebagai kekuatan ‘mayoritas’.

Itu sebabnya banyak produk berlabel Islam kemudian merajai pasar dengan keuntungan berlipat. Putaran bisnis yang menyuguhkan semua produk berlabel Islam menyasar kelas menengah yang perilakunya-mengikuti istilah dalam riset pemasaran-: makin makmur, makin pintar, makin religius. Dalam istilah tertentu, mereka menempatkan kegiatan mengonsumsi itu sebagai praktik peribadatan. Selalu menyoal halal-haram sebuah produk: khususnya bunga bank yang sejak awal posisinya kontroversial. Meminjam istilah Anthony Giddens, kelas menengah Islam sedang terlibat dalam ‘proyek tentang diri’: sesuatu yang secara sadar seorang individu terlibat di dalamnya dan terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kesadaran tentang diri.[22] Diri yang jadi pusat orientasi itulah yang jadi dasar posisi keberadaan seorang muslim dan bahkan posisi kelas sosialnya. Tabel di bawah menunjukkan bagaimana produk perbankan hingga kegiatan keagamaan seperti Haji dan Umroh mengalami peningkatan yang pesat. Isyarat makin banyaknya usaha untuk menentukan diri dan mendefinisikan diri sebagai muslim melalui praktik ekonomi-politik yang dibungkus dengan konsep ibadah. Tabel di bawah ini menunjukan peningkatan laba dari bank Syariah serta membesarnya populasi Jama’ah Umroh, Haji dan Haji Plus

22 Lih Ninuk Mardiana Pambudy, “Gaya Hidup Suka Mengonsumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi”, *Prisma* volume 31, 2012

Peringkat Bank Umum Syariah Berdasarkan Pendapatan Operasional & Asset 2013

No	Bank Syariah	Pendapatan Operasional (Rp Milliar)	Aset (Rp Milliar)
1	Bank Syariah Mandiri	6.776,21	63.965,36
2	Bank Muamalat Indonesia	4.794,21	54.694,02
3	Bank BRI Syariah	1.731,51	17.400,91
4	Bank Mega Syariah	1.673,84	9.121,58
5	Bank BNI Syariah	1.612,22	14.708,50
6	BJB Syariah	528,20	4.695,09
7	Bank Syariah Bukopin	401,50	4.343,07
8	Bank Panin Syariah	283,76	4.052,70
9	Maybank Syariah Indonesia	207,48	2.299,97
10	Bank BCA Syariah	200,96	2.041,42
11	Bank Victoria Syariah	111,78	1.324,38

Tahun	Umrah	Haji	Haji Plus
2009	70.000	191.000	17.241
2010	160.000	197.500	15.000
2011	260.000	201.000	20.000
2012	35.000	193.800	17.200
2013	511.982	154.546	13.564
2014	800.000	155.200	13.600

Sumber: *Majalah SWA 18 XXX Agustus-September 2014*

Semua gembira menyaksikan kebangkitan ini. Terutama Perusahaan, Jasa Pemasaran hingga Lembaga Keuangan. Seperti sihir, tiap pelaku usaha

meyakini bahwa kerinduan kelas menengah untuk hidup sesuai keyakinan harus dibuktikan tidak melalui praktik hidup sederhana tapi mengonsumsi apa saja yang berbau Islam. Itu sebabnya, ekspresi seorang muslim kelas menengah tampak dari keinginan untuk tampil 'saleh, bersahaja, terbuka dan militan'. Unsur militan itu kentara dari keinginan untuk tetap melihat posisi Islam sebagai 'ekslusif, unggul dan pasti benar'. Trend ini yang kemudian menerbitkan ustadz maupun ormas yang berusaha mendekatkan 'suasana psikologis' kelas menengah Islam . Banyak kemudian anjuran untuk memelihara sifat saleh dengan: upaya merumuskan garis batas dengan orang kafir, mendorong ide-ide Syariah untuk membanjiri ruang publik dan melakukan intervensi pada setiap kegiatan ritual pada momen apa saja. Standar ber-Islam kemudian diterapkan untuk kegiatan publik apapun: pendidikan, jabatan politik hingga ruang ekonomi. Meski standar itu artinya memahami Islam yang sesuai dengan budaya hidup modern tanpa harus tampak fanatik atau terlampau sekuler. Jika dulu pada masa Orba itu muncul dalam figur *Catatan Si Boy*: ganteng, kaya dan punya banyak pacar, kini hadir dalam figur Fahri-tokoh dalam ayat-ayat Cinta-yang menanggapi apapun dalam tolak ukur Iman. Iman itulah yang jadi predikat untuk menilai situasi apapun, terutama situasi politik.[23]

Situasi politik ini sebenarnya memberi banyak peluang dan harapan. Peluang bagi lahirnya figur-figur Islam yang diharapkan sekaligus tampilnya gagasan Islam seperti yang diangankan. Eksperimen yang digulirkan kala itu adalah syariah Islam yang diterbitkan dalam Perda. Praktik Syariah ini sayangnya menimbulkan opini yang negatif dan bahkan cenderung menganggap ide ini bertentangan dengan nilai Demokrasi dan HAM. Promosi penegakan Syariah menimbulkan banyak kecaman meski sejak itu mulai muncul politisi maupun ormas yang tak henti-hentinya membangun kampanye mengenai penegakkan Syariah. Sengketa, polemik hingga kecaman bertaburan dimana-mana. Tak ada upaya serius untuk membawa perdebatan ini dalam kerangka yang lebih proporsional dan masuk akal. Para politisi seperti menemukan rumput kering untuk memanfaatkan sentimen ini. Dipacu oleh banyak kasus, pemerintah tampaknya juga tak mau meredakan situasi ini kecuali dengan upaya maksimal membatalkan Perda-Perda yang bertentangan dengan konstitusi. Tapi ranting keyakinan

---

23 Penjelasan menarik mengenai ini dapat dilihat pada Ariel Heryanto: *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, Gramedia, 2015

itu sudah lama menjulur kemana-mana dan menunggu waktu untuk unjuk kekuatan. Kekuatan itu bisa muncul kalau menemukan 'musuh dan sasaran' yang cocok dan tepat. Musuhnya telah ada tapi waktunya yang belum muncul. Hingga pada saat Pilkada, ranting itu tiba-tiba menemukan sandaran.

Sandaran itu bernama 'penghinaan, hujatan dan pelecehan' kitab suci. Predikat yang layak didengungkan untuk merebut simpati massa yang selama ini memilih pasif dan diam. Setidaknya, tumbuh kesadaran keagamaan yang meyakini 'mayoritas' itu bukan sebuah angka statistik tapi kumpulan massa yang bisa digerakkan. Paling tidak Aksi Bela Islam 2 maupun 3 ingin menunjukkan kekuatan itu. Penggerak kekuatan massa itu bukan pada ormas raksasa seperti NU dan Muhammadiyah, tapi organisasi massa yang selama ini selalu aktif dalam propaganda Syariah, seperti FPI, HTI, MIUMI maupun MMI. Pilar kekuatan ini jadi diperhitungkan ketika aparat mulai berusaha menegoisasi bahkan mencegah mobilisasi melalui berbagai cara. Larangan dari ulama maupun pimpinan ormas ternyata tak cukup manjur. Bahkan himbauan dan larangan dari kepala daerah juga tak mempan. Larangan tak hanya berhasil ditangkis tapi juga meningkatkan antusiasme massa untuk ikut terlibat. Genangan massa sepanjang Monas hingga bundaran HI telah menciptakan banyak kisah 'ajaib' yang mempererat keyakinan atas apa yang mereka harap. Harapan pada pemerintah untuk menghukum Ahok hingga menuntut pemerintah untuk mendengar aspirasi mereka. Meski yang paling membuat bangga tak lain adalah keyakinan baru: kalau kekuatan massa Islam tak sekecil yang diduga. Ranting itu kini berusaha membuat pohon dengan melipat-gandakan kesadaran atas 'keunggulan' Islam dan bahkan mempercayai Islam sebagai 'perekat' NKRI, yang sedari dulu, memang bersaing dengan banyak ide-ide politik lainnya. Saya meyakini titik tumpu ranting itu ada pada benih yang telah ditabur oleh Sejarah, Orde Baru, dan Kapitalisme.

Persaingan, pengukuhan posisi, perjuangan merebut kuasa sudah menjadi sejarah panjang kelas menengah Islam di Indonesia. Setidaknya Kuntowijiyo mencatat pergeseran itu muncul di penghujung abad XIX, saat kepemimpinan para santri dipegang oleh para haji. Semula kyai punya peran penting dalam melindungi dan menyebar paham keagamaan lewat pesantren. Prasyarat menjadi kyai tak mudah karena musti punya kom-

petensi pengetahuan, memiliki jalur genealogis hingga teruji dalam mendidik. Sedangkan haji hanya perlu modal biaya dan sejak kapal uap jadi alat transportasi maka kelas menengah mengalami kemudahan untuk naik haji. Haji merupakan ibadah kelas menengah yang modalnya hanya biaya. Orang yang sudah menunaikan Haji memiliki posisi istimewa. Karena Haji jadi sapaan yang mengandung nilai penghormatan. Diperantarai oleh panggilan Haji itulah golongan menengah menemukan tempatnya dalam susunan hirarki di masyarakat.[24] Belanda kadang sebal dengan sikap kaku mereka tapi juga beruntung karena mereka lebih rajin dan punya kemampuan ekonomi. Banyak para pedagang yang naik haji memiliki kemandirian ekonomi, kesungguhan bekerja sekaligus keyakinan agama yang total. Van Mook melihat kasus Kotagede Yogyakarta yang menjadi pusat perdagangan pribumi yang tulang punggungnya adalah Haji orang pribumi. Di sana -hingga sekarang- kaum pedagang dikuasai oleh pribumi. Begitu pula dengan Pekajangan, desa luar yang berada di Pekalongan. Desa yang dikenal sebagai penghasil pedagang muslim dan tumbuhnya kelas menengah Islam.

Menarik untuk dicatat pertumbuhan masyarakat Arab yang punya ikatan dengan golongan menengah. Meski mereka tergolong ‘Timur Asing’ sama seperti Cina, tapi orang Islam tak pernah menganggap mereka saingan usaha. Mungkin karena kesamaan agama yang membuat mereka lebih mudah berbaur. Padahal pada saat itu orang Arab tinggal terpisah, seperti Pasar Kliwon di Surakarta, dengan adat istiadat, kepemimpinan dan sejarahnya sendiri. Salah satu perkumpulan yang kuat dan hingga sekarang tumbuh dengan memiliki pusat pendidikan adalah Al Irsyad - yang saat itu-dirintis oleh orang-orang Arab. Paling penting dalam dinamika hubungan ini adalah orang Arab tak pernah dianggap sebagai ‘saingan’ ekonomi dan ini berbeda sekali dengan orang Cina. Laporan Kolonial Verslag memperlihatkan persaingan gawat antara pengusaha pribumi dengan Cina: pajak perusahaan, bagian dari pedagang pribumi terus menerus turun, sebaliknya para pengusaha Cina terus naik. Singkatnya, kaum pengusaha pribumi dalam usaha kecil mengalami ‘pelipatgandaan’ sedang perusahaan besar dipunyai oleh orang Cina. SI mula-mula berdiri sebagai usaha dagang untuk bersaing dengan pengusaha Cina.

---

24 Lihat, Kuntowijoyo: *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, 1991

Maka dalam pertumbuhan awalnya SI sangat anti Cina. Terlebih pemerintah kolonial memberi banyak hak istimewa untuk orang Cina. Sepanjang tahun 1913, pergolakan anti Cina menyebar ke kota-kota sepanjang Pantai Utara di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai dari Tangerang, terus ke Lasem, Rembang, Tuban, Surabaya dan Pasuruan. Isu rasialisme yang dinyalakan itu kemudian membawa banyak petaka hingga menimbulkan korban jiwa yang besar. Perbedaan Ideologi yang dilandasi oleh kenyataan atas kesenjangan yang memacu begitu rupa, hingga golongan kiri menyuntikkan keyakinan marxis yang lebih sistematik sehingga kerusuhan tak terorganisir menjadi serangan yang diarahkan pada sasaran strategis. SI merah mengubah kesadaran reaksioner menjadi kesadaran anti kapitalisme dengan melakukan kegiatan pemogokan-pemogokan pada perusahaan kereta api, perkebunan, pabrik gula dan seluruh instalasi produksi milik para kapitalis. Sejak itulah prakarsa gerakan diambil alih oleh SI kiri yang meletakkan kategori umat dalam istilah lebih proletar, 'wong cilik'.[25]

Sumbangan SI Merah teramat besar dalam perjuangan SI: di samping menghidupkan unsur populis dalam Islam juga meletakkan Iman dalam sebuah proyek perubahan sosial yang konkrit. Saat itulah banyak rakyat miskin bergabung karena melihat agama tak berpusat pada kegiatan ritual, tapi mengajak mereka untuk memasuki pertarungan dengan kenyataan yang timpang. Pada saat bersamaan, elite dengan massa melalui SI merah berbaur, tanpa jarak dan membangun aliansi yang erat. Muncullah sosok dai yang nekad, militan dan cerdik: Haji Misbach. Begitu pula tuntutan SI terkosentrasi pada perombakan tatanan sosial yang mendasar dengan diawali pada perlindungan atas kaum buruh. Misalnya, SI Semarang yang secara aktif mendorong pemogokan para buruh karena ulah perusahaan yang sewenang-wenang, menentang kebijakan pemerintah dalam menempatkan wakil di parlemen yang dijuluki sebagai 'Boedak Setan Oeang', hingga membentuk sayap kaum miskin radikal, bernama Sarekat Kere (SK).[26] Secara terus-menerus SI melancarkan protes yang berbuah pada penangkapan dan pembuangan hingga pemerintah Kolonial merasa urgen untuk menindas SI secara lebih keji. Penindasan yang lama-kelamaan

25 Lihat, Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan 2001

26 Lihat, Yus Pramudya Jati: *Menjadi Merah: Gerakan Sarekat Islam Semarang 1916-1920*, Kendi, 2017

menjadi benih perpecahan SI yang lebih serius dan signifikan.

Diantaranya kaum santri golongan menengah tak berkenan kiprah SI kiri yang dominan, hingga pada tahun 1923 unsur komunis dalam SI dienyahkan. Bara konflik yang kelak akan membuat posisi SI terus merosot terutama dalam mengikat loyalitas wong cilik. Tak lama kemudian, Muhammadiyah, tulang punggung golongan menengah santri, keluar dari SI tahun 1927. Begitu pula para ulama tradisional memutuskan untuk keluar SI tahun 1926 dengan mendirikan NU (Nahdlatul Ulama). Sejak itu gerakan Islam mengalami kemunduran penting: kehilangan basis wong cilik, surutnya peran kritis golongan menengah dan pengucilan peran ulama hanya sebagai pendidik. Padahal ancaman yang laten dan menghantui adalah kapitalisme yang terus mendesak sekaligus mengancam posisi kelas menengah. Bahkan sejak saat itulah bangunan kesadaran keagamaan selalu memandang umat dalam pengertian yang subjektif-normatif bukan pada kepentingan yang objektif-empiris dengan melihat unsur 'kelas'. Unsur yang dilenyapkan dalam gerakan Islam di kemudian hari dan di masa-masa berikutnya. Itulah fase yang kemudian oleh Castles dikatakan sebagai 'Islam yang terlampau lemah dan terisolasi hingga tak dapat memelopori pengorganisasian untuk pembangunan ekonomi' sekaligus, sebagaimana dinyatakan McVey, Islam yang selalu menganggap 'kedudukannya sebagai anak tiri yang tak dikehendaki' dan lama kelamaan 'kehilangan kemampuan untuk melakukan analisis atas formasi sosial karena mengabaikan ideologi yang berdasar kelas'.

Situasi ini terus memburuk di masa Soekarno dan makin dikucilkan pada masa Orba. Politik massa mengambang telah membuat Islam berantakan segalanya: sebuah upaya politik yang memiliki agenda Islam dianggap membangkang dan kebijakan ekonomi yang kian tak memihak pengusaha Muslim. Hanya lapisan terdidik yang masih bisa disandarkan harapan, terutama mereka bergerak di sektor jasa: dokter, dosen, pengacara, budayawan hingga kaum profesional lainnya. Sayangnya pada umumnya lapisan ini kemudian menjadi komunal dengan menegakkan keyakinan pada tiang terbentuknya identitas sebagai sosok muslim. Di samping karena kegagalan dan ketidak-percayaan pada ormas agama yang ada, juga pembangunan ekonomi yang menimbulkan banyak kesenjangan. Tanpa dasar 'analisis kelas' muncullah banyak asosiasi agama yang merangkul

keyakinan dengan meneguhkan pada otoritas buta. Pada saat itulah muncul serta mengorbit para pemimpin keagamaan yang berasal dari berbagai macam latar belakang: bermodal kemampuan bahasa Arab, memiliki doktrin yang eksklusif dan meyakini bahwa perubahan harus diawali dari perumusan identitas sebagai seorang muslim. Benih-benih itulah yang kelak kemudian dirangkul oleh Orde Baru menjelang mau runtuh: membangun asosiasi politik yang meneguhkan simbol Islam. ICMI salah satunya, tapi banyak juga yang kemudian karena 'proteksi ekonomi' pada akhir kekuasaan Orde Baru terbit berbagai asosiasi politik independen yang tulang-punggungnya adalah pengusaha.

Pengusaha muslim itu dibangun melalui insentif ekonomi sekaligus proses deregulasi yang gencar dilakukan oleh Orde Baru. Para pengusaha ini memang menjadi 'mitra' negara karena lisensi hingga dukungan politik tetap mengandalkan penguasa. Loyalitas pengusaha ini bukan pada kekuasaan semata tapi juga iklim pasar ekonomi yang terbuka. Banyak himpunan pengusaha ini memang harus bersaing dengan pengusaha nonpri, yang diantaranya telah jadi sekutu lama Soeharto. Saat ketika tiap pengusaha musti membina hubungan baik dengan kekuatan politik maka identitas 'muslim' selalu jadi landasan politik untuk bertarung. Terlebih secara berangsur-angsur kekuatan politik Islam menjadi pendukung utama kekuasaan Soeharto saat mau berakhir: melalui ICMI utamanya. Terjadilah perpaduan yang kemudian dinamai oligarkhi: perpaduan kekayaan dan kekuasaan politik-birokratis yang diartikulasikan melalui pembauran antara keluarga penguasa dengan keluarga pengusaha. Terutama di masa reformasi, dimana muncul banyak aktor politik yang kerapkali memanfaatkan sentimen agama karena punya keinginan untuk duduk dalam struktur kekuasaan. Kini aktor-aktor itu sedang memasuki panggung politik dengan memanfaatkan kesempatan 'konstitusional' yang sudah disediakan. Lapisan borjuis reaksioner ini mulai meyakini bahwa mereka tak lagi tergantung pada institusi kekuasaan otoriter yang terpusat, sebagaimana pada masa Orba, tapi mengembangkan relasi ganda: pada satu sisi tetap membangun hubungan patronase dengan para predator tapi juga di sisi lain juga hendak mendirikan kapitalis domestik dengan membangun kerajaan bisnis.[27] Kesempatan melakukan itu semua sekarang sedang berjalan.

---

27 Lihat, Vedi R. Hadiz dan R. Robison, "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia", *Prisma* vol 33, 2014

Ruang kesempatan itu jadi panggung ‘pertarungan’. Kelas borjuasi Islam berada dalam persaingan ekonomi yang sengit. Kompetisi ekonomi yang keras, penuh kompromi dan brutal mulai terjadi antar kekuatan dengan berusaha untuk menguasai negara. Negara dalam sistem yang neoliberal sekarang ini menjadi ruang berebut: bukan hanya perannya sebagai fasilitator dengan kekuatan modal tapi juga negara telah jadi ‘sumber pemasokan’ logistik yang berarti. Proyek-proyek yang berbuah korupsi, termasuk haji dan kitab suci, menjadi semacam papan petunjuk betapa banyak kebijakan yang mengalirkan laba. Aliran uang itulah yang membuat sengketa kepentingan antar kekuatan ekonomi jadi panggung besar yang terus dinyalakan. Rasialisme hanya ‘kedok’ bagi perebutan asset ekonomi yang kini terkosentrasi pada otoritas negara. Kelas menengah Islam yang hidup dalam iklim keagamaan puritan kian meyakini bahwa dalam urusan ekonomi politik kini waktunya mereka ambil peran terdepan. Tapi mereka juga tahu bahwa ‘peta sosialnya’ rumit, kompleks dan kompetitif sehingga saluran partisipasi politik apa saja akan mereka coba. Pintu kesempatan apapun yang bisa mempertahankan posisi ‘kelas menengah’ dan mendorong mobilitas mereka untuk ‘berkuasa’ akan terus diperjuangkan.

Pemilu salah satu pintunya, dimana partai Islam selalu saja kalah dalam kompetisi politik terbuka. Ini tentu amat menyakitkan dan kadang diberi kesimpulan ironis: matinya politik Islam. Kesimpulan yang ada benarnya tapi juga memukul kesadaran identitas paling dalam. Tak ada figur yang bisa ‘dijual’ ke umat untuk memenangkan arena kompetisi itu: survai hingga penjajakan suara tak mampu mengangkat sosok yang bisa mewakili umat. Padahal ada kepercayaan diri yang kuat: bukan hanya pada angka statistik tapi juga gemuknya kelas menengah. Meski di sisi lain ada mayoritas umat yang terpinggirkan dan terus dimarginalisasi oleh proyek pembangunan neoliberal. Ramuan situasi itulah yang membawa keinginan untuk memutar arus jalannya sejarah seperti pada masa SI. Kombinasi yang pernah dirintis oleh SI pada tahapan awal sejarah kini kembali dipraktikkan, sebab mereka tahu bangunan sistem politik yang ada sekarang ini takkan mampu membuat kaum borjuis Muslim mencetak lompatan: dari kelas menengah yang makmur menjadi kasta politik yang berkuasa. Upaya meraih itu telah disediakan ‘caranya’ oleh Orde Baru: meramu sentimen agama yang dihapus unsur populisnya, memuliakan rumusan baru umat yang diselipi dengan unsur-unsur fasis militer, dan menebarkan ketakutan

terhadap segala sesuatu yang berbau Ras. Kombinasi yang pernah muncul pada penghujung akhir abad XIX dan paruh awal abad XX mau dihidupkan lagi.

Kali ini pertanyaan akhirnya, apa yang ingin dilakukan oleh Gerakan Kiri, baik Islam Kiri, Islam Progresif maupun Islam Bergerak? Beranikah melakukan intervensi sebagaimana yang dilakukan oleh Semaoen, Haji Misbach dan Mas Marco pada masa itu: meradikalisasi kesadaran keagamaan untuk ditiupkan bangunan keyakinan populis pada kumpulan massa yang kini sedang berusaha mengorganisir diri? Atau hanya memberikan perhatian sejenak karena meyakini bahwa ini gelembung balon yang akan pecah dan berujung pada negoisasi kepentingan ekonomi politik? Jawaban sikap ini akan menentukan sejauh mana Islam “progresif’ memiliki kekuatan massa yang nyata dan signifikan.***

Sumber: http://indoprogress.com/2016/12/kelas-menengah-islam-wajah-keagamaan-tanpa-ide-populis/

Teman dijadikan musuh

Ian Wilson

DI SEBUAH kota di mana demonstrasi menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, rencana aksi demonstrasi pada 4 November 2016 di Jakarta mestinya tidak terlalu istimewa.

Rencana aksi demonstrasi ini telah mendominasi pemberitaan media di minggu-minggu terakhir, khususnya yang terkait dengan kemungkinan meletusnya kekerasan selama aksi tersebut. Ini yang kemudian mendorong Presiden Joko Widodo mengunjungi Prabowo Subianto, mantan musuhnya saat pemilihan presiden 2014, dalam rangka mengurangi kemungkinan ketegangan yang bakal terjadi selama aksi. Foto mereka berdua berada di atas sadel kuda menjadi *headline* pemberitaan. Sementara itu, para tokoh senior TNI berspekulasi kemungkinan lahirnya “Arab Spring”, merujuk pada demonstrasi besar yang berlangsung di Timur Tengah yang mampu menurunkan rezim penguasa. Analis lain mengingatkan kemungkinan aksi ini disusupi oleh para simpatisan ISIS.

Diorganisir oleh Front Pembela Islam (FPI), bersama dengan kelompok garis keras Islam lain, demonstrasi tanggal 4 November 2016 itu merupakan demonstrasi kedua dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2016, yang menuntut penangkapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, yang konon dianggap telah menghina ayat suci Al Quran.

Nada retorika yang muncul di sekitar aksi demonstrasi sudah begitu sangat mengerikan. Tuduhan penistaan agama telah bertumpuk dengan pidato-pidato penuh kebencian dengan nada rasis. Gubernur merupakan keturunan Tionghoa beragama Kristen. Berbagai spanduk berisi materi kekerasan etnis telah terpasang di seluruh kota, seolah mengembalikan ingatan perih tentang kekerasan yang menimpa keturunan Tionghoa pada 1998. Pilkada gubernur pada Februari 2017 tahun depan tampaknya dipenuhi kampanye yang penuh sektarianisme.

FPI bukanlah pendatang baru dalam tipe politik seperti ini. Sepanjang 16

tahun terakhir, organisasi ini telah sangat menguasai dalam memanfaatkan beragam ketegangan sosial dan ekonomi, dan kemudian menginjeksinya dengan aroma sektarian.

Ancaman kekerasan terhadap kelompok minoritas lain seperti Ahmadiyah, kelompok Kristen Batak, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT), dan Muslim Syiah juga sudah lama berlangsung. Di tahun 2001, FPI memprotes pencalonan Presiden Megawati yang dianggap dilarang oleh ajaran Islam untuk menjadi presiden, karena ia seorang perempuan.

Campuran antara isu-isu berisi politik adu domba, dengan menggunakan moral sebagai alat pukul dan pemerasan, cara premanisme jalanan, dan bersamaan dengan itu "kegunaan" FPI bagi para elit politik, telah memungkinkan organisasi yang sebenarnya pinggiran (dibandingkan dengan organisasi Islam besar lain seperti NU dan Muhammadiyah) untuk meninju lebih kuat ketimbang kemampuan aslinya. Kehebohan yang mengiringi demo ini, terlepas dari apapun yang akan terjadi nanti, akan dilihat sebagai keberhasilan promosi yang tak ternilai bagi FPI.

Tetapi, apa yang dapat menjelaskan meningkatnya jumlah warga miskin dan kelas pekerja di Jakarta yang bergabung dalam aksi jalanan yang diorganisir oleh FPI demi melawan gubernur? Beberapa analis mengargumentasikan ini disebabkan karena telah meningkatnya intoleransi dan ekstrimisme agama yang dibiarkan merajalela oleh pemerintah, dengan asumsi ketakutan akan "Islamic backlash" (pukulan balik dari kekuatan Islam). Atau sebagaimana yang diargumentasikan oleh ahli lain, aksi demonstrasi ini hanyalah kasus elit politik yang memobilisasi massa sebagai bagian dari strategi menjelang Pilkada Februari 2017 mendatang.

Kedua argumen besar di atas tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Namun demikian, perlu mempertimbangkan konteks-konteks Jakarta yang spesifik yang dapat menjelaskan aksi demonstrasi ini. Sejak 2014, saat Ahok menjadi gubernur, sampai saat ini, dia telah melakukan penggusuran paling massif dalam sejarah modern kota Jakarta. Data statistik yang dapat dipercaya menyebutkan angka korban yang tak bisa diabaikan. Data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta memperkirakan lebih dari 16.000 warga miskin dan kelas pekerja beserta keluarga mereka yang tergusur dalam dua

tahun terakhir. Hanya 30% telah mendapat rumah pengganti yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi penggusuran sangat buruk bagi warga miskin dan kelas pekerja Jakarta.

Kebijakan penggusuran ini sangat populer di kalangan kelas menengah Jakarta. Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya yang tak bisa ditawar lagi dalam menanggulangi banjir, kemacetan, dan ketakpatuhan warga miskin terhadap hukum.

Apa yang gagal dilihat oleh publik, atau mungkin diabaikan, adalah kemarahan dan kekecewaan yang dihasilkan dari pelaksanaan rejim kebijakan ini. Kemarahan ini telah menyebar melampaui para korban, keluarga besar mereka, teman, komunitas, dan jaringan sosial dan kultural.

Tidak mengejutkan, kemarahan ini membutuhkan saluran pelampiasan.

Ketika Ahok turun ke lapangan, di Penjaringan, Jakarta Utara, ia dilawan oleh ratusan anak muda yang melempar batu. Beberapa mereka berteriak “Allahu Akbar”, tapi sentimen yang muncul dari teriakan itu bukanlah ekstrimisme agama. Teriakan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap teman dan tetangga yang telah kehilangan rumah akibat penggusuran. Seorang remaja menjelaskan apa yang ia lakukan pada saya: “Saya termotivasi (melempar batu) karena separuh dari teman kelas saya tidak punya rumah lagi gara-gara Ahok. Oleh karena itu Ahok tidak bisa kami terima di sini.”

Anak-anak muda yang sama yang datang pada demonstrasi bulan Oktober 2016 tersebut, dan menuntut Ahok ditangkap, akan mungkin datang ke demonstrasi 4 November 2016.

Beberapa kelompok warga sekarang turun ke jalan melawan gubernur dengan menggunakan spanduk yang disediakan oleh FPI dan kelompok Islam garis keras lain. Mereka adalah warga yang dua tahun sebelumnya adalah para pendukung gubernur. Mereka juga lah yang menjadi korban penggusuran paksa.

Kelompok-kelompok agama garis keras dan kelompok reaksioner lain

makin dekat satu sama lain, dan telah membentuk kelompok oposisi melawan Ahok, khususnya di kalangan warga miskin dan kelas pekerja Jakarta. Menguatnya relasi mereka disebabkan juga karena tidak ada saluran alternatif yang tersedia bagi warga miskin dan kelas pekerja (untuk menyalurkan kemarahan mereka).

Sejak Jokowi menjadi presiden, intelektual publik dan aktivis kelas menengah mengabaikan perjuangan warga miskin Jakarta. Organisasi keagamaan besar yang dikenal seperti NU juga lebih banyak berdiam diri, lepas dari keanggotaannya yang sangat besar di Jakarta Utara, khususnya di kalangan warga korban penggusuran.

Harapan terakhir bagi banyak warga kampung adalah partai yang mengklaim diri sebagai partainya orang kecil, yakni PDI Perjuangan. Ketika partai ini justru mendeklarasikan dukungan pada Ahok, kekecewaan dan frustrasi warga kampung makin menguat.

Kesan impunitas gubernur, sebagaimana yang ia lakukan dalam mengabaikan status hukum korban penggusuran Bukit Duri, telah memperbesar persepsi bahwa gubernur adalah hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, teori konspirasi tentang keterlibatan sekelompok kecil pengembang (*developer*) keturunan Tionghoa dalam beragam proyek di Jakarta seperti menemukan lahan subur untuk tumbuh. Kabar tentang tindakan gubernur yang konon menghina Al Quran, adalah hal terakhir yang tak dapat lagi ditoleransi.

Tanpa suara dan tanpa organisasi warga yang kuat untuk warga yang terpinggirkan akibat kebijakan Ahok, pintu telah terbuka lebar bagi kelompok Islam garis keras. Dan kelompok garis keras ini telah memanfaatkan kesempatan ini.

Bagi para konsultan politik di belakang Ahok, ini semua tampak sebagai tindakan "radikalisasi" melawan Ahok. Bagi mereka, apa yang akan berlangsung pada 4 November bukan sesuatu yang buruk. Momentum ini seolah membuktikan pada kalangan kelas menengah bahwa mereka yang beroposisi pada Ahok dilatari semangat sektarian, bukan pada kepedulian yang mendalam atas dampak kebijakan Ahok. Selain itu, aksi 4 November

seperti mengkonfirmasi bahwa warga miskin dan kelas pekerja Jakarta adalah kelompok yang berbahaya dan berwatak tidak liberal

Debat publik tentang dampak kebijakan penggusuran atau aspek legal dari proyek reklamasi Teluk Jakarta telah, selama beberapa saat, menghilang sepenuhnya. Manajer kampanye Ahok, Ruhut Sitompul, yang juga merupakan tokoh senior organisasi preman Pemuda Pancasila bahkan menyatakan bahwa para demonstran yang melakukan aksi penistaan agama, adalah "tim sukses" Ahok.

Apapun yang muncul dari demonstrasi 4 November, kemarahan warga miskin ibukota dan pelabelan buruk terhadap mereka, akan tetap ada. Perlunya ada kesediaan untuk mendengar mereka

Artikel ini sebelumnya terbit dengan judul asli: *Making enemies out of friends*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Amalinda Savirani.

Sumber: https://medium.com/@forumkampungkota/teman-dijadi-kan-musuh-466fb328f5db#.x97gs1fuv

II

Menginterogasi Aksi Islam Politik

Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan Islam

Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza

"APA yang terjadi sekarang adalah agama dipakai sebagai alat, dan saya kira itu yang harus dicegah. Tanggung jawab pemimpin-pemimpin Indonesia melakukan pencegahan tersebut," ujar Sidney Jones, pakar keamanan dan konflik Asia Tenggara, pada sebuah diskusi menyoal aksi besar-besaran yang dilakukan gerakan Islamis untuk menjegal calon gubernur Ahok hari ini. Belakangan, himbauan "jangan bawa-bawa agama" atau "jangan gunakan agama" semakin mudah kita temukan dalam berbagai frasa. Setelah Ahok resmi menjadi cagub (calon gubernur) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), frasa yang paling ramai diucapkan dari himbauan itu adalah "jangan gunakan Islam sebagai alat politik."

Bukan hanya para pendukung Ahok saja yang menggunakan himbauan ini untuk menjawab orang-orang yang menentang Ahok lantaran beragama Kristen. Beberapa penentang Ahok pun turut menggunakan himbauan semacam ini. Ali Taher, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung pasangan Agus-Silvy, misalnya, meminta Ahok "jangan menyalahgunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik." Artinya, himbauan ini dapat digunakan oleh siapa pun yang menganggap lawannya *off-side* dalam urusan agama dan politik.

Persoalannya, bagi gerakan-gerakan Islam tertentu garis *off-side* ini tak pernah ada. Sebagaimana dicatat oleh Kumar (2012: 22-23), sejak awal abad ke 20, muncul gerakan Islam bertujuan politik mengembalikan supremasi Islam dari gerusan kolonialisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh muslim seperti Hasan Al-Bana dan Abul Ala Al Maududi. Gerakan yang kemudian kita kenal sebagai Islam Politik ini sejak lama telah berada di Nusantara, menjadi bagian dari apa yang telah kita pahami sekarang sebagai Islam Nusantara itu sendiri—dan kita bisa melihat mereka ada dalam demo hari ini sebagai salah satu kekuatan dominan. Menghimbau varian gerakan Islam

ini untuk “tidak menggunakan Islam untuk politik” sama dengan menghimbau “jangan gunakan oksigen untuk bernapas.” Maka pertanyaannya, siapkah kita—baik sepakat maupun tidak sepakat—menerima gagasan Islam Politik sebagai bagian dari khazanah pemikiran politik di Indonesia?

Apa yang mengkhawatirkan dari kebangkitan gerakan Islam, dengan Islam Politik sebagai salah satu eksponennya, di Indonesia hari ini adalah ia hadir di tengah kekosongan kekuatan politik berbasis kelas dan neoliberalisasi ekonomi yang semakin gila-gilaan. Terlebih di kota seperti Jakarta. Berman dan Rose, menjelaskan bahwa neoliberalisasi ekonomi yang membawa ekses pada kehidupan sehari-hari nan keras masyarakat urban, pada akhirnya menciptakan lingkungan ideal yang memunculkan solidaritas dan identitas komunal berbasis agama. Percepatan industri yang berlangsung sejak Orde Baru menciptakan *lumpenproletariat* dalam jumlah besar. Mereka lah, sebagai bagian dari masyarakat muslim yang sekian lama ditindas dan dihisap secara ekonomi oleh pemerintahan sekular, yang kemudian diwadahi aspirasi dan keluhannya oleh gerakan Islam secara populistik (Hadiz 2016: 43)

Ditambah perang melawan terorisme di tataran global, dua konteks di atas telah membentuk persepsi (negatif) kita terhadap IslamPolitik. Terlebih lagi Islam Politik yang diekspresikan di jalanan.

Ada banyak prasangka-prasangka tidak sehat yang dilancarkan terhadap gerakan Islamis. Salah satu yang paling sering dikemukakan di media sosial adalah bahwa gerakan ini tidak pas dengan ekosistem nusantara dan harus diasingkan ke Timur Tengah. Ini pandangan yang sama keblingernya dengan kelompok rasis ultra-kanan Golden Dawn di Yunani, yang menganggap semua kekerasan berasal dari Arab dan harus dikembalikan ke Arab.

Ada pula prasangka merendahkan yang menganggap setiap aksi massa Islam Politik merupakan kerumunan pengangguran yang mengharap nasi bungkus. *Pertama*, prasangka semacam ini telah mengalihkan perhatian dari biang keladi pengangguran yang sebenarnya, yaitu kapitalisme. Seolah-olah gerakan Islamis itulah yang telah bertanggung jawab pada semakin mencemaskannya tingkat pengangguran, padahal kita sedang

menghadapi rezim perburuhan yang mengimani fleksibilitas tenaga kerja. *Kedua*, dengan merendahkan massa gerakan Islamis sebagai massa yang hanya termotivasi imbalan, maka kita tidak akan bisa memahami perspektif politik mereka beserta kontradiksi-kontradiksinya. Tidak akan ada diskusi yang dapat berlangsung demokratis dan dewasa jika prasangka ini terus dipertahankan.

Banyak pula yang sebenarnya lebih menentang aksi massa ketimbang Islam Politik. Selepas aksi gerakan Islam gelombang pertama pada 14 Oktober 2016, media sosial ribut berhari-hari soal taman-taman yang rusak di sekitar Monumen Nasional. Ini keributan yang sama tidak substantifnya dengan meributkan tumpukan sampah di dekat Istana Negara selepas demonstrasi Hari Buruh. Beberapa orang yang meributkan taman-taman rusak dekat Monas adalah orang yang diam saja ketika perusahaan-perusahaan tambang merusak pegunungan Kendeng dan bertempik sorak ketika saudara-saudara kita di Papua dibunuhi dengan keji atas nama NKRI. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang menggandrungi ketertiban khas fasis. Orang-orang yang alergi terhadap demokrasi jalanan. Mereka, kelas menengah urban yang sibuk mengecam kemacetan, taman rusak, dan tumpukan sampah selepas demonstrasi, tak pernah merasakan betapa berkomunikasi dengan massa dalam suatu aksi politik jalanan bukanlah perkara mudah.

Sikap alergi terhadap aksi massa semakin tampak ketika banyak yang mencibir aksi anti-Ahok di luar Jakarta dan menjadikan aksi-aksi tersebut sebagai bahan lelucon. Padahal ini sama juga dengan para pendukung Celtic FC yang mengibarkan bendera Palestina di Skotlandia, atau aksi solidaritas terhadap Papua yang digelar di Yogyakarta. Tidak ada yang konyol dari menggelar aksi lintas batas geografis.

Cibiran-cibiran banal terhadap gerakan Islamis mencerminkan ketidaksiapan kita menerima Islam Politik sebagai bagian dari pemikiran politik di Indonesia. Padahal suka atau tidak, Islam Politik sudah menjadi bagian dari pemikiran politik nusantara sejak lama. Jika memang kita siap menerima Islam Politik sebagai bagian dari khazanah pemikiran politik di Indonesia, maka kita perlu memberikan kritik yang radikal terhadap kontradiksi-kontradiksi gerakan Islamis.

Deradikalisasi yang kerap kali digunakan baik oleh negara maupun kelompok bukan negara sebagai strategi membendung gerakan Islamis, bukanlah strategi yang tepat. Untuk apa melakukan deradikalisasi terhadap gerakan Islamis yang memang tidak radikal sama sekali? Radikal berarti mengakar, sehingga bertindak radikal artinya bertindak berdasarkan pamahaman yang mendalam. Mengumbar rasisme tanpa malu-malu dan mengobral tuduhan kafir, seperti yang dilakukan gerakan Islamis macam Front Pembela Islam (FPI), tidaklah mencerminkan suatu tindakan yang berangkat dari pemahaman mendalam.

Kita sedang melihat gerakan Islamis bingung. Mereka menggelar aksi besar-besaran karena tuduhan penistaan yang kurang meyakinkan dengan barang bukti potongan video dari Facebook. Beberapa kelompok yang menolak demokrasi liberal sebagai produk kafir justru getol turun ke jalan pada momen-momen elektoral seperti sekarang. Hal ini menandakan karakter reaksioner mereka yang tidak punya agenda jelas. Mereka mendesak Ahok ditangkap oleh polisi Indonesia dan diproses dengan hukum Indonesia. Artinya, secara tidak langsung gerakan Islamis mengakui ketundukan mereka pada polisi dan hukum Indonesia yang dalam beberapa kesempatan mereka sebut sebagai sistem taghut. Belakangan banyak kaum Islamis menyerukan semboyan absurd seperti "NKRI bersyariah" dan beberapa kaum Islamis lain bersekutu secara politis dengan seleb Ahmad Dhani yang sudah kenyang dengan kemesuman dunia hiburan. Kita bukan sedang menghadapi gerakan Islamis yang radikal, kita sedang menghadapi gerakan Islamis yang dangkal dan kebingungan. Menanggapi mereka dengan cibiran-cibiran yang dangkal pula tidak akan memperbaiki apa pun.

Dalam situasi sekarang, kita justru membutuhkan gerakan Islam yang radikal. Kita membutuhkan gerakan Islam yang bergerak secara kolektif bersama umat dengan pemahaman mendalam. Kita membutuhkan gerakan Islam radikal yang menentang Ahok bukan karena agama atau rasnya, tetapi karena kedzhalimannya meremehkan aspirasi rakyat miskin kota yang ia gusur. Kita membutuhkan Islam radikal yang bisa berseru lantang "tiada tuhan selain Allah" di hadapan tuhan-tuhan palsu kapitalisme.

Jadi terhadap saudara-saudara kita yang turut pada aksi pada 4 November, tak perlu kita mencibir aksi mereka, atau menentang aksi massa mereka

yang terbukti memang ampuh dalam kebuntuan demokrasi pasar seperti sekarang. Cukup kita ajukan pertanyaan: sedang apa kalian ketika para kapitalis dengan rakusnya mengambil hak kelas pekerja dengan cara yang bathil? Bukankah itu menistakan Al-Baqarah ayat 188? Sedang apa kalian ketika perusahaan-perusahaan tambang hendak merusak pegunungan? Tidakkah itu menistakan Al-A'raf ayat 56?***

Sumber: http://islambergerak.com/2016/11/mendudukkan-kembali-prasangka-negatif-atas-gerakan-islam/

Aksi Massa dalam Perspektif Islam Progresif

Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah Izzati

ISLAM Politik sektarian menjadi wajah dominan dari Islam Politik dewasa ini.

Aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 lalu, yang dilakukan oleh sejumlah elemen gerakan Islam, sepertinya semakin mengonfirmasi penilaian tersebut. Gabungan dari berbagai ekspresi politik, mulai dari sentimen etno-religius yang puritan hingga rasis-sektarian, kekecewaan politik, politik patronase elit, hingga ekspresi kelas, bercampur baur menjadi satu dan sulit terbedakan satu sama lain.

Menghadapi kenyataan tersebut, adalah mudah untuk terjebak dalam pandangan-pandangan yang dualistis, yang meneguhkan oposisi-oposisi biner antara pihak *establishment* Jakarta dengan para pendemo. Narasi-narasi liberal dan developmentalis akan segera meringkus peristiwa 4 November itu sebagai pertarungan antara pematangan proses-proses demokratik dalam saluran politik yang ada dengan kekuatan-kekuatan politik yang sektarian. Di sisi lain, narasi-narasi Islamis dan populis, dengan segala gradasi dan variannya secara sempit melihat peristiwa itu sebagai pertarungan antara "umat Islam" dengan "penguasa yang dzalim" atau, lebih parahnya lagi, "Cina Kafir."

Bagaimanakah seharusnya Islam Progresif dan saudara-saudara seperjuangannya – kaum Kiri dan elemen-elemen progresif-demokratik yang lebih luas – membaca dan merespon aksi massa kemarin? Satu tawaran penafsiran dan preskripsi politik sudah dikemukakan oleh kawan Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza[28] dalam editorial *Islam Bergerak*. Meskipun bersepakat dalam banyak hal dengan mereka, kami merasa perlu mengoreksi sejumlah pembacaan, mempertegas sejumlah posisi, dan menambahkan sejumlah argumen untuk kembali merumuskan posisi Islam Progresif vis-à-vis fenomena aksi massa 411 itu.

---

28 Lihat artikel Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza, *Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan Islam*, dalam Bab 2-4 buku ini.

Untuk memulai, kita perlu melihat konteks struktural-historis dari kemunculan aksi tersebut dan profil sosiologis dari para demonstran. Uraian Ian Wilson[29] dengan terang menjelaskan bahwa kebijakan penggusuran administrasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin mengganas – yang mengorbankan sekitar 16,000 rumah tangga kaum miskin kota dan kelas pekerja, menurut data LBH Jakarta – semakin memperkuat sentimen anti-penggusuran dan anti-Ahok terutama di antara lapisan-lapisan kelas sosial yang paling termarginalkan dalam model pembangunan Ahok. Kekecewaan dan kemarahan atas hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan, kurangnya basis pengetahuan emansipatoris dan wadah politik alternatif, serta kuatnya organisasi-organisasi Islamis dengan tendensi fundamentalis dan vigilantis seperti FPI, membuat ekspresi keagamaan menjadi satu ekspresi politik yang dominan dari "sentimen kelas" tersebut.

Profil sosiologis dari para demonstran 411 juga beragam, meskipun artikulasi politik yang paling mengemuka adalah Islamisme dalam variannya yang sektarian. Tentu ada elemen-elemen dari kelompok-kelompok vigilantis seperti FPI, tetapi ada juga elemen-elemen dari gerakan Islam yang lain, seperti Tarbiyah-PKS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan lain sebagainya. Profil demonstran sendiri dapat dikatakan bersifat lintas kelas, mempertautkan elemen-elemen kaum miskin kota, kelas menengah, pemuka agama sektarian, dan elit-elit (serta para bohir, broker, dan operator lapangannya) yang memiliki kepentingan politik dari mobilisasi massa kemarin.

Selanjutnya, kita perlu melihat pertautan antara dinamika politik elit dengan mobilisasi massa di lapangan. Ini merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan kepekaan politik yang tinggi. Pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan adalah siapa saja elit-elit yang mempunyai kepentingan dan mendapatkan keuntungan dari aksi demonstrasi kemarin? Di titik ini, kita perlu melihat irisan antara aspirasi dan ekspresi politik "dari bawah" dengan kalkulasi politik "dari atas." Misalnya, kita perlu mempertanyakan, apa hubungan antara aksi demonstrasi kemarin dan dampaknya dengan manuver-manuver sejumlah elit dan broker politik seperti Habib Rizieq,

29 Lihat Ian Wilson, *Teman Dijadikan Musuh*, dalam Bab 1-3 buku ini.

SBY, pendukung dan penentang Ahok (dan juga Jokowi), Fadli Zon, Fahri Hamzah, Buni Yani, dan lain sebagainya. Kita juga perlu melihat dinamika tersebut dalam konteks politik lokal Jakarta dan nasional yang lebih luas. Kesadaran akan hal ini akan membantu kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang strategis dan krusial, seperti mengapa terjadi kericuhan di Penjaringan pasca aksi demonstrasi kemarin? Mengapa terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap sejumlah fungsionaris HMI? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita perhatikan dan jawab secara seksama terutama ketika menghadapi publik yang biasanya apatis dengan politik dan cenderung tidak familiar dengan dinamika berbagai jenis aksi demonstrasi dan mobilisasi massa di lapangan – dan karenanya cenderung ahistoris, naif, dan konservatif dalam berpolitik.

Pertanyaan terakhir namun tidak kalah penting adalah sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang saling bertikai ini mempengaruhi penggerusan ruang demokrasi yang ada. Di satu sisi, sinisme dan pembatasan terhadap aksi demonstrasi memberi justifikasi terhadap tatanan ekonomi-politik yang ada untuk terus menerus melakukan "penertiban", apalagi pasca terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Terlepas dari segala macam permasalahannya, aksi demonstrasi 4 November dalam derajat tertentu dapat dilihat sebagai satu ekspresi politik yang legitim – sama legitimnya dengan aksi massa buruh atau kelompok-kelompok minoritas etnis, agama, dan seksual. Kita juga harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam suatu bentuk esensialisme, memasukkan kelompok-kelompok Muslim konservatif dengan Islamis sektarian dalam satu wadah identitas yang sama. Di sisi lain, narasi-narasi rasis-sektarian dan agenda anti-penistaan agama yang dibawa oleh para demonstran juga tidak kalah problematiknya. Apabila tidak dilawan dan didelegitimasi, dalih sektarian dan anti-penistaan adalah "dalih karet" yang rawan dipakai untuk semakin meringkus dan menggerus ruang demokrasi yang ada, yang dicapai via perjuangan yang panjang dan tidak mudah.

Dengan kata lain, kita harus melihat demonstrasi kemarin dalam perspektif ekonomi-politik yang lebih *kaffah* untuk memahami sejauh mana batas potensi emansipatoris – atau reaksioner – dari mobilisasi massa

yang kemarin terjadi, apalagi ketika kita sejauh ini hanya bisa memahami dinamika di lapangan secara parsial. Untuk itu, kita perlu menahan diri untuk membuat klaim empiris yang definitif mengenai aksi 4 November yang lalu. Dibutuhkan riset lapangan, kajian mendalam, serta, tentu saja, kemauan untuk bergumul dalam dinamika kehidupan rakyat sehari-hari untuk mengetahui artikulasi politik "Islam" apa yang paling mengemuka.

Tetapi sejauh ini, kenyataannya Islam Politik di Indonesia pasca reformasi masih didominasi oleh sektarianisme yang menihilkan perspektif kelas dalam gerak dan wacananya. Artikulasi Islam Politik di Indonesia dewasa ini masih belum banyak menyentuh persoalan yang menyangkut kehidupan dan penderitaan umat sehari-hari. Sebagai ilustrasi, Islam Politik belum banyak tampil di depan dalam berbagai permasalahan umat seperti perampasan tanah, penggusuran, penolakan terhadap reklamasi pantai, perjuangan upah layak, dan sebagainya. Dalam ranah keseharian, banyaknya kelompok-kelompok pengajian dan majelis taklim dari ruang-ruang kantor hingga pemukiman nyatanya cenderung belum berkontribusi untuk membangun keterorganisiran umat secara ideologis. Formasi isu dari berbagai kelompok dan organisasi Islam masih cenderung dipimpin oleh minat di seputar *habluminallah* dan belum banyak mengakar dalam hal *hamblumminannas*. Padahal, problem tersebut merupakan problem aktual yang hadir membelenggu umat, yang mayoritas, yang dipinggirkan dan dimiskinkan.

Alih-alih menjadi pembela umat yang tersingkir (*mustadhafin*), sebagaimana spirit Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, Islam Politik masih lebih banyak mengangkat isu-isu identitas dan sentimen sektarian. Ini menjadi problem serius bagi Islam Politik di Indonesia yang indikatornya dapat dilhat pada menguatnya berbagai organisasi Islamis pasca reformasi. Artinya, konsepsi Islam sebagai agama pembebasan kaum tertindas pun belum menjadi wajah dari berbagai organisasi Islam maupun Islam Politik secara keseluruhan.

Terkait dengan itu, mobilisasi massa pada aksi 411 lalu pun lebih banyak menyuarakan tuntutan yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan pembebasan umat dari belenggu permasalahan aktual keseharian yang mencekiknya. Sebagai ilustrasi, pada aksi-aksi massa menolak reklamasi

atau penggusuran misalnya, kemarahan dan keterlibatan organisasi-organisasi Islam justru tidak pernah terlihat massif. Sementara di sisi lain, umat Islam cenderung lebih mudah tergerak untuk dimobilisasi secara massif, misalnya, pada isu solidaritas Palestina, Rohingya, atau Suriah. Tentu saja ini bukan hal yang buruk, akan tetapi menjadi menarik karena wajah Islam Politik yang tampil justru terlihat seperti "pandang bulu" dalam kemanusiaan dan solidaritas kelas, dengan batas "Islam" sebagai identitas, untuk menggerakkan dan memobilisasi massa.

Kembali ke pertanyaan awal mengenai bagaimana seharusnya Islam Progresif menanggapi aksi demonstrasi 411 lalu, inilah usulan kami: berbeda dengan pembacaan Islamis dan liberal-developmentalis atas aksi tersebut, kami mengajukan pembacaan yang lebih bernuansa.

Perlu diakui bahwa narasi sektarian masih menjadi artikulasi politik yang paling dominan dari elemen-elemen gerakan Islam yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. Dengan demikian, kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa panji Islam Politik atau populisme Islam yang dibawa oleh para demonstran kemarin betul-betul "progresif" atau "emansipatoris", bahwa seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang terlibat kemarin merupakan "representasi" dari kaum miskin kota dan proletariat formal dan informal, bahwa gerakan-gerakan Islam yang menjadi motor demonstrasi merupakan "vanguard." Namun demikian, kita juga tidak bisa menafikkan aspirasi kelas yang meskipun belum hegemonik turut mewarnai demonstrasi tersebut.

Singkat kata, kita tidak boleh terjebak dengan tendensi *buntutisme* – bahwa setiap tindakan massa adalah benar – maupun *elitisme* – yang berjarak dan menyalahkan massa. Elemen-elemen gerakan progresif-demokratik, termasuk Islam Progresif, harus selalu bersama massa, bersama umat dan percaya kepada potensi progresivitasnya sembari memahami batas-batas struktural yang menghambat terealisasinya potensi emansipatoris tersebut serta bergerak mengatasi problem-problem tersebut.

Untuk sampai pada pembacaan yang tepat mengenai realitas sosial umat dan potensi emansipatorisnya, kita membutuhkan pembacaan *materialis* yang lebih menyeluruh terhadap realitas politik yang ada, termasuk reali-

tas politik Jakarta. Ini mensyaratkan Islam Progresif untuk menggunakan *pisau analisa Marxis* dalam melihat realitas sosial yang ada. Meskipun ada kesulitan untuk mempertemukan tradisi keagamaan liberatif seperti Islam Progresif dan sains emansipasi yaitu Marxisme dalam ranah ontologis, setidaknya kedua tradisi tersebut dapat bertemu dalam ranah epistemologis, metodologis, dan praxis. Ini berarti kita harus memahami konteks struktural dalam politik ruang di Jakarta dan pertautan antara dinamika kapitalisme dan konstelasi politik yang ada terutama dalam konteks pilkada.

Dalam kaitannya dengan membangun aliansi dengan elemen-elemen Islam Politik dan Islamis, Islam Progresif perlu memetakan elemen-elemen progresif dari tendensi gerakan tersebut. Tidak semua Islamis adalah FPI yang fundamentalis-vigilantis atau *Ennahda* yang Muslim demokrat. Juga, perlu diingat bahwa seringkali ada *gap* atau kesenjangan antara elit-elit organisasi Islam yang rawan terjebak dalam politik elit dan anggota-anggotanya. Kompleksitas realitas politik yang musti dipahami oleh pegiat-pegiat Islam Progresif dan gerakan progresif-demokratik yang lebih luas untuk memetakan mana lawan, mana kawan, dan mana segmen rakyat yang masih mengambang.

Islam Progresif tidak melihat antagonisme sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan sentimen etno-religius, puritan, apalagi rasis-sektarian. Antagonisme sosial hanya terjadi akibat pertentangan kepentingan antara kelas yang menindas dan kelas yang ditindas. Persis di titik ini, Islam Progresif harus merebut narasi “keadilan sosial” semu *a la* fantasi fundamentalis, nativis, xenophobis, chauvinis, dan rasis di satu sisi dan narasi “pluralisme” semu *a la* liberalisme dan developmentalisme dalam berbagai variannya – termasuk *a la* Islam Liberal – di sisi lain. Untuk menjalankan misi ini, membangun basis keberIslaman yang *kaffah*, kontekstual, dan progresif saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan basis pengetahuan yang lebih kokoh dan kemampuan untuk membaca realitas politik secara lebih berhati-hati, akurat, dan menyeluruh – dua hal yang sayangnya masih agak luput dan kurang eksplisit dari posisi editorial yang diajukan *Islam Bergerak* kemarin. Singkat kata, Islam Progresif memosisikan diri sebagai Islam yang mendukung agenda-agenda pluralisme dan juga keadilan sosial berdasarkan pengetahuan mengenai emansipasi dan transformasi sosial.***

Kami berterima kasih kepada sejumlah kawan atas diskusi dan masukannya dalam proses penulisan artikel ini.

Sumber: http://islambergerak.com/2016/11/aksi-massa-dalam-perspektif-islam-progresif/

Aksi Bela Islam: Antara Bela Agama dan Bela Oligarki

Roy Murtadho

TEPAT 2 Desember 2016, terjadi 'Aksi Bela Islam' gelombang ketiga. Aksi massa ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 4 November 2016, yang menyuarakan pengusutan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Harus diakui, berdasarkan jumlah mobilisasi massa, aksi yang digalang oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) dan dikomandoi oleh FPI pada 4 November lalu, merupakan aksi massa terbesar pasca tumbangnya Orde Baru. Jauh lebih besar ketimbang massa pembela Gus Dur diujung kejatuhannya.

Selain mengagetkan banyak pihak dengan massa yang demikian besar, 'Aksi Bela Islam' yang belakangan populer dengan sebutan aksi 411 dan 212 ini, tak pelak menyeret hampir sebagian besar umat Islam pada perdebatan yang sejak semula tidak produktif dan tidak menyentuh pokok persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia hari ini: mengenai absennya redistribusi keadilan dan minusnya pelayanan sosial bagi rakyat.

Pada tataran akan rumput, perdebatan telah berubah menjadi saling caci antar pendukung Rizieq dan Ahok. Para pendukung 'Aksi Bela Islam' menuding mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung aksi sebagai kurang Islam. Sementara para penolak 'Aksi Bela Islam' menganggap aksi massa yang memobilisasi ratusan ribu orang untuk turun ke jalan, alih-alih membela Islam, justru merendahkan Islam dan tak lebih sebagai buang-buang energi umat Islam untuk hal yang tidak substansial dan remeh temeh. Bahkan, lebih jauh, sebagian besar para pengkritik 'Aksi Bela Islam' menganggap aksi massa sebagai bukan metode perjuangan Islam. Kedua cara pandang inilah yang menurut hemat saya perlu untuk ditanggapi secara serius oleh kalangan gerakan progresif-demokratik di Indonesia, sekaligus sebagai ikhtiar mendudukkan persoalan 'Aksi Bela Islam' tak sekedar persoalan teologis, melainkan membacanya sebagai dinamika pertarungan maupun konvergensi kepentingan antar oligarki dalam lanskap

politik elektoral.

Disinilah pentingnya pandangan alternatif. Selain memberi pilihan cara pandang politik yang tak sekedar hitam putih, sekaligus, kedepan, bisa menjadi pembelajaran bagi publik, khususnya kaum muslim agar tidak mudah terombang-ambing dalam pusaran kepentingan elit oligarki yang saling bertikai, yang setitikpun tidak ada relevansinya dengan hak-hak politik dan ekonomi umat Islam Indonesia.

Di sini, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah dianalisis oleh eksponen Islam Progresif, pada editorial *Islam Bergerak* bertajuk *Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan Islam*[30] , yang ditulis oleh Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza, yang mendapat penajaman analisis oleh Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah Izzati dalam artikel berjudul *Aksi Massa dalam Perspektif Islam Progresif*[31]. Melainkan hanya berfokus pada dua hal. *Pertama*, memberi tanggapan terhadap kecenderungan berpikir Islam Moderat dan Islam Politik yang terlibat dalam pro dan kontra 'Aksi Bela Islam'. *Kedua*, mengelaborasi relasi antar aktor, dan posisi Islam Politik maupun Islam Moderat dalam pusaran kepentingan politik oligarki. Dan selanjutnya menujukkan tugas gerakan progresif-demokratik dalam menyikapi bangkitnya sentimen dan fanatisme beragama.

***

Harus diakui, persoalan 'Aksi Bela Islam' tidaklah sesederhana yang kita duga. Bukan karena sulitnya melihat relasi antara aktor penggerak aksi dengan elit oligarki yang mempunyai kepentingan dibaliknya. Melainkan, karena makin kaburnya peta kelompok-kelompok Islam yang terlibat di dalam kegaduhan ini. Dengan ini tidak bisa kita, misalnya, menganggap para pendukung aksi massa sebagai 'Islam Fundamentalis Sunni' karena dikomando oleh FPI. Karena buktinya, tidak sedikit yang terlibat dalam aksi adalah mereka yang biasa dikelompokkan ke dalam Islam Moderat

---

30 Lihat artikel Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza, *Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan Islam*, dalam Bab 2-4 buku ini.

31 Lihat artikel Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah Izzati, *Aksi Massa dalam Perspektif Islam Progresif,* dalam Bab 2-5 buku ini.

seperti NU. Bahkan, banyak kiai dan santri NU yang terlibat di dalamnya. Berada pada posisi ini, misalnya, Kiai Makruf Amin. Selain menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), beliau juga menjabat sebagai Rais Am PBNU yang merupakan pucuk tertinggi dalam struktur PBNU. Atau kiai Salahudin Wahid, pengasuh pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Bagaimana kita akan mengkategorikan kedua aktor tersebut? Apakah bisa disebut sebagai Islam fundamentalis karena turut menyerukan perjuangan 'Aksi Bela Islam' atau sebagai Islam Moderat karena keduanya orang penting di lingkungan NU, yang oleh banyak pengamat Islam Indonesia dianggap sebagai representasi Islam Moderat? Maka, pada kasus 'Aksi Bela Islam', kategori-kategori yang sudah mapan seperti fundamentalis, moderat, intoleran, toleran, demokratis dan anti demokrasi menjadi sangat kabur dan tidak lagi terang batasannya.

Meski demikian, untuk memudahkan cara baca, tidak bisa tidak, kita tetap perlu menggunakan kategori-kategori meski dengan pengertian sedikit berbeda, yakni memfungsikan kategori bukan sebagai parameter dalam menilai segala persoalan atau isu yang disikapi oleh seseorang maupun kelompok, melainkan hanya secara spesifik pada isu yang tengah kita bicarakan.

Jadi, kalau kita petakan secara sederhana posisi dominan antar kelompok Islam yang terlibat dalam pro dan kontra 'Aksi Bela Islam' setidaknya ada dua: *Pertama*, Islam Politik sebagai pendukung utama aksi. Mereka menganggap apa yang sedang diperjuangkannya sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) yang harus ditanggung oleh semua kaum muslim. Bahkan, salah satu argumen para kiai dan santri yang berafiliasi pada NU, yang terlibat dalam 'Aksi Bela Islam' mendasarkan perjuangannya pada pernyataan pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kurang lebih menganjurkan umat Islam untuk turut membela agama Islam dan sekuat tenaga berusaha menangkis atau menolak orang yang menghina Al-Qur'an dan sifat-sifat Allah.[32]

Pernyataan tersebut akan menjadi sangat problematis jika dipahami secara

32 Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, *Mawa'idz*, hal. 33.

harfiah. Seandainya dipahami secara substansial, maka 'Aksi Bela Islam' sebagaimana yang tengah berlangsung tak akan pernah terjadi. Bukankah kita sendiri, umat Islam, yang justru seringkali menghina Al-Qur'an karena tidak mampu mengamalkannya dalam praktik hidup sehari-hari secara total dan konsekuen?

Mungkin bagi kita, apa yang sedang diperjuangkan dalam 'Aksi Bela Islam' tidak lah substansial, bahkan berpotensi besar mereduksi ajaran Islam mengenai kemanusiaan yang bernilai universal. Namun kita juga tidak boleh naif dengan menganggap aksi semacam ini sesuatu yang homogen. Semua pihak yang terlibat di dalamnya membawa kepentingannya masing-masing dengan perekat utamanya adalah dugaan penistaan agama.

Kedua, Islam Moderat, sebagai penolak utama aksi. Penilaian Islam Moderat pada aspek teologis, dalam melihat 'Aksi Bela Islam' meskipun tepat, sayangnya masih terjebak pada penilaian esensialis. Melalui cara pandang semacam ini, Islam Moderat tidak bisa melepaskan diri dari prasangka yang dibangunnya sendiri yaitu bahwa setiap aksi massa, apalagi ketika diusung oleh pihak yang terlanjur dilabeli sebagai Islam fundamentalis, otomatis akan terjadi kerusuhan, atau berefek negatif secara sosial dan politik. Maka wajar jika kita dapati tanggapan mereka terhadap aksi massa cenderung alergi dan sinikal.

Ketika menjelang 'Aksi Bela Islam' gelombang pertama pada 4 November, kalangan Islam Moderat menganggap aksi massa berpotensi rusuh, juga memunculkan statemen yang melihat—dengan minus analisis—aksi 4 November (411) sebagai agenda teroris internasional ISIS di Indonesia yang harus diwaspadai karena berpotensi besar merongrong kedaulatan NKRI (dengan harga mati!).

Di luar dugaan, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Aksi massa relatif berjalan secara damai. Bahkan Rizieq sendiri memberi pernyataan bahwa FPI tak ada kaitannya dengan teroris ISIS. Dengan ini prasangka Islam Moderat sama sekali tidak terbukti.

Tentu saja sulit mengaitkan FPI dengan ISIS yang secara teologis salafi-wahabi. Untuk lebih memudahkan memahami diferensiasi antara ormas

semacam FPI dengan ISIS atau PKS, baik kiranya kita tunjukkan terlebih dahulu perbedaan pokok keduanya.

Berbeda dengan ISIS, FPI secara teologis dan kultural justru sama dengan NU. Sama-sama Ahlussunnah wal jamaah (sunni) dan kultur keberagamaan yang mengafirmasi tradisi. Bahkan pada batas tertentu, sama-sama dekat pada kultus individu pada figur-figur yang dianggap memiliki spiritualitas tinggi yang disebut wali. Percaya pada keramat orang yang dianggap dekat dengan Allah. Sebaliknya, ISIS dengan semangat pemurnian Islamnya, anti terhadap tradisi, sehingga menghancurkan semua situs-situs berharga dalam Islam yang dianggapnya sebagai biang kemusyrikan.

FPI tidak menyerukan otentisitas ajaran Islam dengan slogan kembali pada Qur'an dan Hadis. Sementara kaum salafis, seperti ISIS dan versi yang agak moderat seperti PKS, menyerukan kepada otentisitas berciri kembali kepada *yang-lama* dengan gembar-gembor: 'kembali kepada sumber' (*retour aux sources*) yang berarti kepada kitab suci dan Hadis Nabi. Ini tak jauh berbeda dengan slogan Martin Luther dalam anjurannya untuk reformasi agama: *Sola Scriptura* (hanya kitab suci saja). Inilah khas gerakan revivalisme Islam, mereka menganggap bahwa *antidote* dari kejumudan dan kekalahan umat Islam dari Barat adalah kembali kepada kesucian awal sebagaimana dipraktikkan Nabi dan sahabat. Tanpa disadari, cara pandang semacam ini, sebagaimana kritik Hasan Hanafi, menjadikan masa lalu sebagai obat duka lara umat Islam masa kini. FPI tidak menolak konsepsi negara bangsa, sementara salafis, termasuk di dalamnya ISIS, menolak konsep negara bangsa sebagai suatu *taghut* produk Barat yang harus diganti dengan hukum Allah. '*La khukma Illallah*', tiada hukum selain hukum Tuhan, demikian slogan mereka.

Menuding 'Aksi Bela Islam' sebagai agenda besar terorisme, selain hanya kegenitan, juga sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Meski tidak menutup kemungkinan aksi massa disusupi dan dimanfaatkan oleh manuver kelompok salafis-wahabi yang juga ingin mendapat keuntungan politik di dalamnya. Tudingan tersebut benar seandainya aksi massa dilakukan secara rahasia. Namun realitas dan kondisi faktual sendiri yang menjawabnya.

***

Apa yang luput dari perdebatan kedua kubu yang sedang pro dan kontra adalah saling klaim posisinya sebagai paling benar, sembari mengabaikan kenyataan kaitkelindan kepentingan antar elit oligarki yang mengendalikan konflik sesungguhnya. Artinya dalam 'Aksi Bela Agama' dan penolakannya, Islam Politik dan Islam Moderat tak memberi tawaran alternatif apa-apa, karena keduanya tak lain hanyalah bidak catur bagi kepentingan oligarki. Pihak Islam Moderat, karena membela Ahok, mereka menutup mata pada semua tindakan penggusuran terhadap kaum miskin kota yang dilakukan secara sewenang-wenang bahkan melanggar hukum oleh Ahok. Sementara Islam Politik, karena tidak memakai analisis kelas dalam melawan Ahok, mengakibatkannya tergelincir pada rasisme yang tidak manusiawi (bahkan tidak Islami).

Jika pesan Allah dalam Al-Qur'an dan pesan Nabi dalam hadis dimaknai secara substantif, tidak tekstualistik-skripturalistik, pengertian membela Islam sesungguhnya bukanlah pada seberapa *ngotot* kita bisa memenjarakan mereka yang tidak percaya pada firman Allah, melainkan pada perjuangan membela kaum yang dilemahkan baik secara struktural maupun kultural. Begitu pula, seandainya perjuangan meneguhkan Islam tak hanya sekedar merayakan toleransi (*at-tasamuh*), dan pluralitas, (*at-ta'addudiyah*) minus redistribusi keadilan, maka Islam Moderat tak akan rabun melihat persoalan umat. Jadi, redistribusi keadilan inilah yang merupakan aktualisasi dari prinsip keseimbangan (*at-tawazun*) dan keadilan (*al-'adalah*)

Sedemikian, kalau boleh jujur, pemicu (*push factor*) dari semua kegaduhan ini, sesungguhnya bukan terletak pada mulut Ahok, melainkan Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP, yang dengan mudah bisa dipolitisasi sebagai alat untuk menjatuhkan seorang lawan politik. Padahal UU penyalahgunaan atau penodaan agama ini diterbitkan oleh pemerintah untuk menangani aliran-aliran kebatinan yang muncul pada masa Orde Baru (Orba). Artinya UU produk Orba ini dipakai sebagai legitimasi untuk melakukan penertiban ala militer pada semua hal yang dianggap berpotensi merongrong wibaba pemerintah dan kedaulatan negara.

Berdasarkan catatan Setara Institute, sejak diterbitkan sampai 1998 hanya ada 10 kasus penodaan agama, salah satunya adalah kasus dugaan

pencemaran agama yang menyebabkan pemimpin redaksi *Tabloid Monitor*, Arswendo Atmowiloto, yang dihukum penjara selama lima tahun pada 1990. Namun, anehnya, pasca reformasi jumlah kasus yang menggunakan aturan penodaan agama justru meningkat menjadi sekitar 50 kasus. Ini dimungkinkan dengan menguatnya politisasi agama pasca reformasi.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya sikap politik kalangan gerakan progresif demokratik memandang bangkitnya Islam Politik? Apakah mungkin gerakan progresif beraliansi dengan Islam Politik? Sebelum menjawabnya, kita mesti terlebih dahulu memahami watak Islam Politik itu sendiri.

Pada dasarnya Islam Politik berwatak reaksioner dan anti perubahan. Berbeda dengan perspektif gerakan progresif yang anti borjuasi dan anti imperialism, Islam Politik dengan watak reaksionernya, tak ubahnya bidak catur. Mereka menjadi kepanjangan tangan kepentingan politik maupun ekonomi kaum borjuasi komprador lokal, *Nouveaux riches* (orang kaya baru), yang merupakan anak kandung imperialisme global. Dengan demikian, Islam Politik dengan watak reaksioner dan rasisnya, alih-alih menghancurkan oligarki, justru mengekalkan dominasi oligarki (kelas borjuasi) terhadap kelas pekerja.

Hingga sekarang belum kita dengar ada faksi Islam Politik yang mengafirmasi perspektif anti imperialisme sebagaimana diajukan oleh kalangan gerakan progresif. Islam Politik tak pernah sungguh-sungguh anti borjuasi dan anti imperialisme meski dengan bahasa populisnya yang terdengar revolusioner. Lagi-lagi, karena wataknya yang reaksioner dan rasis membuat mereka menjadi anti Barat, bahkan anti Kristen dan Yahudi ketimbang anti borjuasi. Sehingga seringkali mereka harus bertanggung jawab terhadap sikap fanatisnya yang menyerang kelompok agama lainnya.

Islam Politik, tak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia Islam lainnya, mereka tak pernah menjadi bagian dari perjuangan pembebasan rakyat, bahkan seringkali terlibat melegitimasi undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat. Ikhawanul Muslimin di parlemen Mesir, misalnya, sebagaimana ditunjukkan Samir Amin, memberi dukungan pada undang-undang yang berisi penguatan hak-hak kepemilikan pribadi yang

merampas hak-hak petani penyakap yang merupakan mayoritas petani kecil di Mesir. Sementara di Indonesia sendiri, nyaris tak pernah kita dengar Islam Politik mengadvokasi petani yang tengah dirampas tanahnya; memperjuangkan upah layak bagi kelas pekerja; memobilisasi massa dalam kepentingan membela hak-hak warga miskin kota yang digusur secara sewenang-wenang, dll.

Meski demikian, setidaknya ada dua argumen yang diajukan beberapa kalangan gerakan progresif untuk mendorong gerakan sosial secara keseluruhan untuk berdialog dengan gerakan Islam Politik. *Pertama*, karena Islam Politik memiliki massa yang sangat banyak yang tidak bisa diabaikan atau diremehkan. *Kedua*, adanya kemungkinan mengimplan kesadaran kelas pada Islam Politik dan menariknya ke dalam blok politik alternatif yang mengusung politik kelas, mengingat sebagian besar massa Islam Politik merupakan kaum proletar dan lumpen proletar yang menjadi kekuatan revolusioner sesungguhnya.

Usulan tersebut tak sepenuhnya keliru dengan prasyarat bahwa kesadaran kelas bisa muncul di tubuh Islam Politik dan melucuti tendensi reaksioner, anti perubahan dan rasisnya. Jika tidak, maka tak jauh berbeda dengan, misalnya, memasukkan massa Nazi atau Fasisme ke dalam Front Kiri yang selama ini konsisten berada di wilayah konflik kelas. Kembali pada pertanyaan sebelumnya: apa mungkin Islam politik menjadi bagian dalam gerakan progresif atau sebaliknya, mungkinkah gerakan progresif menjadikan Islam Politik sebagai sekutu perjuangannya melawan penindasan? Iya, sejauh Islam Politik bisa menjadikan perspektif kelas sebagai basis perjuangannya.

Bagaimana dengan Islam Moderat? Islam Politik (baik yang sunni maupun salafi-wahabi) dan Islam Moderat, hakikatnya berada dalam kubangan yang sama: memperjuangkan politik identitas dan menjadi sekadar bidak kepentingan elit oligarki. Keduanya tak pernah mengusung perjuangan kelas dengan menyerukan menggulingkan tatanan lama yang dikooptasi oleh oligarki dengan membangun tatanan baru yang lebih berkeadilan, egaliter dan manusiawi. Keduanya justru mengekalkan posisi oligarki. Tak heran kedua kubu yang terlibat dalam perdebatan pro kontra ‘Aksi Bela Islam’ di permukaan, tak akan menawarkan alternatif apapun selain de-

bat moral yang tidak menyentuh pokok persoalan yang dihadapi umat. Jadi, pendeknya, keduanya hanyalah bidak politik oligarki. Mereka saling beradu dalil dan beradu pukul sejatinya tengah berjuang membela kepentingan politik oligarki bukan membela agama, apalagi untuk nasib umat Islam Indonesia. *Naudzubillah mindzalik****

Batam, 26 November 2016

Menuju Bela Islam Yang Hakiki

Muhammad Nashirulhaq

AKSI "Bela Islam" sudah sampai pada jilidnya yang ketiga. Aksi yang mulanya bertujuan menuntut penyelesaian kasus hukum penistaan agama, yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kini bergeser lebih jauh berisi tuntutan pemenjaraan atas Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.[33]

Kasus penistaan agama maupun aksi Bela Islam ini benar-benar menyita perhatian publik, baik di tingkat akar rumput maupun di kalangan elite. Di tingkat masyarakat awam, perbincangan terkait hal ini begitu merasuk dan hampir selalu muncul dalam obrolan tiap hari, entah dalam pertemuan langsung, apalagi dalam WAG (WhatsApp Group) maupun grup *chat* lainnya. Tak sekadar menjadi pembicaraan massa awam, di tingkat elite, isu ini juga mendorong manuver-manuver para aktor politik, baik yang bertujuan memolitisir isu ini (dan menungganginya untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya) maupun yang hendak meredam eksploitasi kasus penistaan agama maupun aksi Bela Islam.

Dalam perjalanannya, kasus penistaan agama ini lalu memunculkan kasus dan pembahasan lain yang bergulir begitu saja, yang kalau kita mau jujur, sebenarnya tak produktif dan tak relevan dengan kehidupan umat. Misalnya, perdebatan soal penafsiran Al-Maidah 51 (termasuk yang terjadi di satu "klub diskusi" para elite di satu stasiun televisi, yang kemudian, lagi-lagi, memancing perdebatan di kalangan yang lebih luas), terutama soal makna kata "*waliy*" di ayat itu; perdebatan soal kebolehan memilih dan mengangkat pemimpin non-muslim; dan sederet perdebatan lainnya. Yang terakhir, misalnya, ketika eksponen Aksi Bela Islam jilid 3 berencana menggelar aksi dalam bentuk Salat Jumat yang akan memblokade jalan, lalu mendatangkan komentar dari seorang ulama panutan, KH. Musthafa Bisri, bahwa hal itu merupakan "bid'ah yang besar". Komentar ini kemudian menuai tanggapan lagi dari *netizen* yang lalu dianggap sebagian kalangan (utamanya *nahdliyyin*) sebagai tanggapan kasar, menghina, dan

---

33 www.bbc.com/indonesia/indonesia-38127609

bahkan melecehkan nama baik serta kredibilitas beliau selaku ulama NU.

Besarnya perhatian yang dicurahkan pada isu ini, sampai-sampai membuat isu lain yang muncul dalam beberapa minggu terakhir, seakan hanya isu sekunder yang patut diberi perhatian sambil lalu. Semisal kasus represi dan tindak kekerasan aparat terhadap para petani yang mempertahankan lahannya dari proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Majalengka; atau kasus agraria hampir serupa, yang juga muncul di Langkat, Sumatera Utara. Padahal, kalau kita mau jujur, kasus-kasus semacam ini, yang menyangkut kelangsungan hidup rakyat dan hak mereka atas lahan dan ruang, tak kalah penting dibanding isu penistaan agama. Atau bahkan, kasus agraria semacam itu, yang nyata dan berkaitan langsung dengan hajat hidup manusia itu sendiri, justru yang lebih penting.

Sebenarnya, sejak mengemukanya isu penistaan agama ini, sudah muncul banyak kekecewaan, yang disuarakan terutama oleh kalangan progresif dalam menanggapi isu ini. Kita mungkin masih ingat, tak lama sebelum kasus ini mengemuka, Gubernur DKI saat itu menuai banyak kritik, berkaitan dengan kebijakannya yang semena-mena (dan tak jarang, juga mendahului hukum), terutama dalam menggusur masyarakat kelas bawah di beberapa titik di Jakarta. Yang terakhir, tentu saja di Bukit Duri.[34] Menaiknya isu penistaan agama, yang—tak bisa ditampik—membesar terutama karena faktor tambahan berupa identitas agama dan etnik pelakunya—dalam hal ini yaitu Ahok—lalu menimbun diskusi-diskusi kritis dan pembicaraan terkait isu ketidakadilan sosial yang menimpa warga kelas bawah, akibat kebijakan rezim pro-modal; perampasan hak; perebutan ruang antara rakyat dan pemodal; dlsb. Seperti dinyatakan Coen Husain Pontoh, tema diskusi yang mengemuka di ruang-ruang publik (termasuk di sosial media), yang sebelumnya berpijak pada "politik kelas", lalu terambil alih dan tergantikan oleh perdebatan-perdebatan tak produktif yang berbasis politik identitas.[35]

---

34 Bukit Duri adalah contoh paling mutakhir dari kebijakan penggusuran oleh penguasa DKI Jakarta saat ini, dan "hanya" satu dari rangkaian penggusuran yang sudah dijalankan sebelumnya. hal ini seperti terlihat dalam film dokumenter *Jakarta Unfair*.

35 Coen Husain Pontoh, "Politik Kelas vs Politik Identitas" dalam Harian IndoPROGRESS, 10 Oktober 2016.

Lalu di tengah adanya isu-isu yang berpijak pada “politik kelas” dan “politik identitas” ini, di lapangan pergerakan manakah kita sebagai muslim, harusnya mencurahkan perhatian lebih besar?

Islam, antara Politik Identitas dan Politik Kelas

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ
(116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 117

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu, orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang untuk (berbuat) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa (116). Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri, semata karena kezaliman penduduknya, sedang mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS Hud: 116-117).

Saya ingin memulai pembahasan ini dengan beberapa ayat dalam Al-Qur’an, sebagai titik masuk yang, saya kira, bisa memantik perbincangan lebih lanjut.

Dua ayat dari Surat Hud di atas menceritakan tentang kebinasaan dan penumpasan yang dialami oleh umat-umat terdahulu, yang ditimpakan oleh Allah sebagai *adzab* bagi mereka. Jika diperhatikan secara jeli, terkesan ada yang “janggal” dan kontradiktif dalam ayat di atas (*Ta’arudh*, dalam nomenklatur agama), terutama di ayat kedua, yang menyatakan bahwa *Tuhanmu* (Allah) tidak akan menghancurkan suatu negeri, semata sebab kezaliman penduduknya, ketika mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Pertanyaan yang langsung timbul di benak kita, bagaimana mungkin orang-orang yang zalim, di saat yang sama dikategorikan sebagai “*mushlihun*” (orang-orang yang berbuat kebaikan)?

Dalam upaya mengurai hal ini, Fakhruddin ar-Razi, seorang *mufassir* besar dari abad ketujuh, coba menjelaskan dalam karya tafsirnya, *Mafatih al-Ghaib* (yang sering juga disebut *Tafsir al-Kabir* atau *Tafsir ar-Razi*), bahwa “kezaliman” di sini bukanlah dalam pengertian yang umumnya dipahami dan digunakan. “Kezaliman” di sini, lebih tepat diartikan sebagai “kemusy-

rikan”, seperti yang dinyatakan oleh ayat lain:[36]

إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان : 13

“*sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar*” (QS Luqman 13).

Setelah menafsirkannya seperti itu, lalu ar-Razi menjabarkan,

“artinya, bahwa Allah ta’ala tidak akan membinasakan penduduk suatu negeri, hanya sebab keadaan mereka yang musyrik, jika mereka masih berbuat kebaikan (dalam pengertiannya yang paling luas, pen) dalam kehidupan sosial (mu’amalat) di antara mereka. Kesimpulannya, adzab yang membinasakan dan memusnahkan (adzab al-isti’shal) tidak diturunkan oleh Allah SWT hanya dikarenakan keadaan suatu kaum yang menyekutukan Allah.

Tetapi, adzab itu akan diturunkan oleh Allah SWT ketika kaum itu juga melakukan kejahatan dalam perkara sosial mereka (mu’amalat) dan bertindak menyakiti (termasuk represi menggunakan kekerasan saat ini, pen), *dan dzalim*.

Karenanya, para fuqaha telah menyatakan, bahwa urusan-urusan yang menjadi hak Allah (*penyembahan, peribadatan, dst*) *dibangun di atas prinsip kemurahhatian* (Allah) *dan kemudahan, sedangkan perkara-perkara yang menjadi hak sesama manusia, landasannya adalah asas penegakan yang ketat* (*ad-dhayyiq*) *serta perlindungan* (terhadap hak sesama manusia tsb).

Selain itu, disebutkan juga dalam suatu hadits, bahwa suatu pemerintahan akan bisa bertahan dengan adanya kekafiran (kemusyrikan di dalam pemerintahan tsb), tetapi tidak akan bisa bertahan dengan adanya kezaliman (dari penguasa terhadap rakyatnya, maupun antar sesama rakyat). Jadi (sekali lagi), makna dari ayat di atas adalah, bahwa Allah tidak akan membinasakan pen-

---

36 Metode ini sering disebut tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an atau tafsir bi al-ma’tsur, yaitu mengartikan dan menafsirkan satu frasa atau bagian dari ayat al-Qur’an, dengan bantuan penjelasan yang ada di ayat lain dari al-Qur’an. Lih: Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hlm 71.

duduk suatu negeri hanya sebagai akibat dari kemusyrikannya, selama mereka masih menjunjung tinggi prinsip kebaikan (as-shalah) dan kebenaran (as-sadad) dalam interaksi dan tindakannya terhadap orang lain.

Dan pemahaman seperti ini adalah penakwilan Ahlus Sunnah terhadap ayat ini. Mereka berpendapat: adapun dalil dari hal ini adalah, bahwa kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Luth, dan Nabi Syu'ayb dibinasakan hingga tumpas oleh Allah SWT, sebagaimana dikisahkan-Nya, sebab tindakan mereka yang menyakiti manusia (idza' an-nas) dan dzalim kepada makhluk Allah."

Dari penafsiran ayat dan pemaparan ar-Razi di atas, ada beberapa hal yang cukup menarik dan perlu digarisbawahi:

1. Ia berkali-kali (setidaknya sebanyak 3 kali) mengulangi penjelasan bahwa adzab yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, bukan semata dikarenakan kemusyrikan mereka, tetapi terutama disebabkan tindak kekerasan mereka yang menyakiti (*idza'*) dan kezaliman mereka atas sesamanya. Pengulangan ini, hampir bisa dipastikan, mempunyai fungsi *lit ta'kid* atau menguatkan dan mengukuhkan pesan yang hendak disampaikan.

2. Ar-Razi juga menyatakan bahwa suatu masyarakat akan selamat dari azab Allah selama mereka masih menjunjung tinggi prinsip kebaikan (*as-shalah*). Patut diduga, penekanannya pada konsep *as-shalah* bertolak dari landasan *ushul fiqh* dan *qawaid fiqh* yang menggariskan bahwa mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) itulah yang menjadi tujuan dari adanya syariat Allah (*maqashid as-syari'ah*).[37] Dalam hal hubungan antara penguasa dan rakyat, konsep kemaslahatan ini lalu menurunkan (men-derivasi) kaidah "*tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah*" (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, harus berdasarkan asas kemaslahatan).

3. Dalam ayat pertama, Allah secara implisit menyeru kepada makhluknya untuk mencegah adanya *fasad* (kerusakan di muka bumi). Dan dengan keterangan bahwa orang-orang yang mencegah terjadinya *fasad* merupakan orang-orang yang diselamatkan oleh-Nya, berarti secara

37 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm 364.

mafhum mukhalafah (pemahaman sebaliknya), mereka yang binasa adalah mereka yang bertindak *ifsad* (menyebabkan kerusakan) itu sendiri. Hal ini senada dengan pernyataan Allah dalam ayat yang lain:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Kata "*fasad*" dalam ayat itu, bisa dimaknai sebagai kerusakan secara ekologis, seperti sedikitnya hasil tanaman (*qillat an-nabat*), kekeringan, dan hilangnya sumber daya hayati di laut, sebagaimana ditafsirkan oleh al-Qurthubi.[38] Dan penyebabnya, menurut ar-Razi, adalah kefasikan dan kemaksiatan manusia (dalam pengertiannya yang luas), tetapi bukan dalam hubungannya yang vertikal (dengan Allah SWT/*hablun min Allah*), melainkan dalam hubungan sesama manusia (*hablun min an-nas*) maupun dengan alam (*hablun min al-'alam*). Sebabnya, kata al-Razi, karena kefasikan dan kemaksiatan mewujud dalam tindakan yang mengingkari nilai-nilai yang digariskan Allah SWT. Sehingga, sasaran tindakan dan perbuatan ini bukan lagi Allah, tetapi juga sesama manusia.[39]

Dengan pemahaman ayat ini, dan seiring perkembangan pengetahuan, kita lalu jadi sadar bahwa azab dari Allah SWT seringkali bukan berupa azab yang ditimpakan begitu saja dan secara tiba-tiba kepada umatnya. Tetapi, secara lebih luas, azab itu bisa saja berupa kerusakan alam sebagai akibat dari satu proses panjang, yang kalau ditelusuri akarnya, sebenarnya disebabkan ulah perbuatan manusia itu sendiri (*bima kasabat aydi an-nas*). Krisis ekologis yang mulai nampak bagi kita hari ini, harusnya menjadi pemantik kesadaran kita, jangan-jangan ini sebentuk peringatan Allah kepada kita agar kita kembali (*la'allahum yarji'un*) kepada cara-cara yang lebih beradab dalam memperlakukan alam, dan lebih manusiawi dalam

38 Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (t.t., al-Maktabah as-Syamilah, t.th) juz 14 hlm 40.

39 Ar-Razi menusliskan *"li anna al-ma'shiyyata, fi'lun la yakunu lillah, bal yakunu lin nafsi"*, lih: Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir ar-Razi* (t.t., al-Maktabah as-Syamilah, t.th) juz 12 hlm 145.

memperlakukan manusia. Termasuk, tentu saja, kita harus semakin kritis terhadap perusakan—terlebih misalnya berupa penggusuran yang berdampak langsung pada kehidupan manusia—yang dilakukan atas nama pembangunan dan dengan dalih kemajuan.

***

Lalu apa hubungan semua ini dengan aksi Bela Islam jilid 3 yang dilakukan pada 2 Desember ini?

Kita tentu tak bisa memungkiri bahwa ada banyak motif yang menggerakkan massa untuk terlibat dalam aksi ini. Termasuk di antaranya adalah tujuan-tujuan mulia untuk menegakkan keadilan dan mendorong supremasi hukum yang seringkali tumpul ketika berhadapan dengan penguasa. Tetapi, jika aksi ini lalu menyita terlalu banyak perhatian, bahkan sampai menutupi isu-isu yang tak kalah penting dan bahkan berkaitan langsung dengan nasib dan kepentingan rakyat, seperti pengambilalihan lahan dan kekerasan yang menimpa para petani di Sukamulya, kita perlu menggemakan lagi pesan-pesan al-Qur'an seperti dalam ayat di atas.

Sebagaimana dalam penafsiran para ulama ahli tafsir,[40] sudah jelas kiranya, bahwa penyebab utama turunnya suatu azab adalah tindak perbuatan suatu umat terhadap alam maupun sesamanya. Seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir, Abdullah bin Abbas bahkan sampai menekankan, "Allah tidak akan merusak dan membinasakan satu kaum, kecuali karena perbuatannya. Dan ia tak akan menumpas satu umat hanya karena kemusyrikannya".[41] Karenanya, meskipun mungkin didasari niat mulia untuk *nahi munkar,* kita patut bertanya pada peserta aksi 411 maupun 212, jika mereka bisa marah kepada seorang pemimpin non-muslim yang dianggap menista al-Qur'an, kenapa mereka tak marah dengan kadar

40 Patut digarisbawahi, penafsiran seperti dipaparkan sebelumnya, bukan hanya oleh ar-Razi seorang. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kitab tafisr, diketahui bahwa banyak kitab-kitab tafsir lain yang memiliki penafsiran serupa, seperti dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Baghawi, Tafsir al-Alusi, al-Bahr al-Muhith, Tafsir al-Baidhawi, Zaad al-Masir, Fath al-Qadir, al-Lubab li ibn 'Adil,* dll.

41 *Tafsir Bahr al-'ulum li as-Samarqandi* (t.t., al-Maktabah as-Syamilah, t.th) juz 2 hlm 360.

yang sama atau lebih, ketika manusia, sebagai makhluk yang dimuliakan Allah (QS al-Isra' 70) dihinakan dan dinistakan kemanusiannya karena mempertahankan haknya? Kenapa mereka sebagai *khalifah* Allah di muka bumi tak murka, justru ketika bumi sedang dirusak oleh sekelompok manusia, hanya karena segolongan orang itu memiliki modal berlebih? Mengapa meraka tak beraksi ketika nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam al-Qur'an sedang dinistakan? Di mana saja mereka ketika warga di Kendeng, petani di Urut Sewu, dan masyarakat di Sukamulya justru membutuhkan dukungan untuk mempertahankan tanah mereka dari pengambilalihan yang semena-mena oleh negara maupun korporasi?

Padahal, ketika kemanusiaan sedang dihinakan, nilai keadilan sedang dinistakan, apalagi ketika alam sedang dirusak dan dijarah oleh segelintir pihak itu, mereka—dan juga kita, tentunya—sebagai orang yang (mengaku) beriman kepada Allah dan Hari Akhir, harusnya takut pada ancaman yang lebih besar dari penistaan al-Qur'an. Sebuah ancaman yang dimaklumatkan langsung oleh Allah dalam al-Qur'an:

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلوا أن الله شديد العقاب (25

"Dan takutlah kalian dari adzab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya."

Mengenai ayat ini, Abdullah ibn Abbas berkomentar, "*melalui ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar tak mendiamkan saja tindakan kemunkaran* (dalam pengertiannya yang luas, *pen*). *Karena kemunkaran dan kerusakan itu bisa mendatangkan adzab, yang akan menimpa bukan saja orang-orang zalim* (yang berbuat kemungkaran dan kerusakan itu) *dalam masyarakat, tetapi juga manusia secara umum*".[42]

Karenanya, ada yang jauh lebih penting dari soal identitas, perdebatan mengenai pemaknaan Al-Ma'idah 51, atau tentang boleh-tidaknya non-muslim menjadi pemimpin. Jika kita ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang binasa karena kezaliman orang-orang di dalamnya, maka selayaknya kita lebih menaruh perhatian pada upaya melawan kezaliman dan keserakahan ini, bukan justru berkutat di isu SARA (suku, agama, ras,

42 *Tafsir al-Qurthubi,* juz 7 hlm 391.

dan antar-golongan). Tentang hal ini, Ibn Taimiyyah, seorang ulama besar dari abad ke-7 H sudah mengingatkan dalam satu karyanya, dalam bab "*al-ma'ashiy sabab al-masha'ib*" (kemaksiatan [lagi-lagi, dalam pengertiannya yang luas] sebagai penyebab dari musibah):

اللهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً

"*sesungguhnya Allah akan menolong negeri yang adil, meskipun negeri itu* (penduduk dan pemimpinnya) *kafir. Dan Allah tidak memberi pertolongan pada negeri yang zalim* (berisi kezaliman) *meskipun negeri itu* (penduduk dan pemimpinnya) *adalah orang-orang beriman*".[43]

Ibn Qayyim al-Jauziyya, seorang ulama besar dalam bidang *ushul fiqh* yang juga murid Ibn Taimiyyah, memperkuat pendapat gurunya, dalam satu karya besarnya, *I'lam al-Muwaqqi'ien*:

"Sesunguhnya Allah mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya agar manusia bisa bertindak adil (dalam segala laku hidupnya). Maka, jika tanda-tanda keadilan telah menampakkan diri dengan jalan mana pun, maka di sana syariat Allah dan agama-Nya berlaku. Dengan jalan mana saja keadilan dapat ditegakkan, maka di sana ada kesesuaian dengan agama, bukan berseberangan; Tidak dapat dikatakan pemerintahan yang berkeadilan bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengannya; sejalan dengannya".[44]

Jika kita perhatikan, ada kesamaan penekanan antara dua pendapat ulama di atas, yaitu nilai keadilan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk membentuk pemerintahan yang ideal (dan sesuai dengan syariat Islam). Wajar, sebenarnya. Dalam al-Qur'an, kata *al-'adl* yang merupakan asal kata *adil* disebutkan setidaknya sebanyak 28 kali. Sementara kata lain yang memiliki arti serupa, seperti *al-qisth* disebut sebanyak 23 kali.[45] Kea-

43 Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa li Ibn Taimiyyah* (t.t., al-Maktabah as-Syamilah, t.th), juz 6 hlm 340.

44 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqiien* (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun) *juz 6 hal 26.*

45 Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*

dilan adalah satu prinsip paling dasar dan sangat penting dalam Islam. Dalam satu ayat, Allah menyebut keadilan sebagai sesuatu yang dekat dengan ketakwaan (QS al-Ma'idah: 8). Tak heran kalau Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama kontemporer dalam bidang *ushul fiqh*, juga mengategorikan keadilan, khususnya keadilan sosial (*al'adalah al'ijtima'iyyah*), sebagai salah satu *maqashid as-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).[46] Penekanan Islam atas asas keadilan ini juga dinyatakan oleh Ibn Qayyim dalam satu kutipannya mengenai esensi dari syariat Islam:

> "Sesungguhnya dasar dan pondasi dari syariat Islam adalah hikmat dan kemaslahatan bagi manusia. Maka yang disebut syariat secara keseluruhan seharusnya berdasar dari nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Jadi, setiap hukum yang berpaling dari keadilan menuju ketidak-adilan, dari rahmat menuju lawannya, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmat menuju kesia-siaan, maka bukanlah termasuk syariat, meskipun dihasilkan dari penafsiran terhadap nash (al-Qur'an & al-Hadits). Syariat adalah keadilan Allah kepada hamba-hambanya; rahmat Allah kepada makhluk-makhluk-Nya; naungan-Nya di dunia; dan hikmah yang menunjukkan secara sempurna kapada kebenaran-Nya dan Rasul-Nya."[47]

Artinya, adanya syariat (Islam), salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan tatanan yang egaliter dan berkeadilan, tak hanya dalam hal politik (elektoral),[48] tapi juga secara substansial, dalam aspek sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kesejahteraan (dan kekosongan kekuatan politik progresif) lah yang berakibat mudahnya isu-isu identitas dan sektarian dieksploitasi sebagai artikulasi politik. Sudah saatnya, ormas-ormas Islam menggeser fokus perhatiannya dari hal-hal yang tak relevan dengan problem umat, seperti politik praktis; dinamika di tingkat elite; dst, kepada

---

(Bandung: Mizan, 1996).

46 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm 364-366.

47 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'ien*, juz 3 hlm 149.

48 Sebagaimana yang dipahami kalangan liberal.

hal-hal konkret yang berkaitan langsung dengan kehidupan umat.

Peran Ormas Islam dalam Membela Umat

Jika mau jujur, dalam terciptanya kesenjangan dan kondisi kesejahteraan umat yang menyedihkan nan memprihatinkan hari ini, ada andil (setidaknya secara pasif) ormas-ormas Islam yang semakin mengabaikan fungsi sosial-kemasyarakatannya untuk ikut memperbaiki kondisi sosial-ekonomi umat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Jangankan sampai pada tahap itu. Kenyataannya, dalam banyak kasus yang merugikan umat, seperti perampasan dan pengambilalihan lahan (*land grabbing*), penggusuran, perusakan lingkungan akibat ulah korporasi, serta tindakan represi yang hampir selalu menyertai hal-hal itu, hampir tak ada ormas Islam yang bersuara, alih-alih membela umat. Tak jarang pula terjadi, elite-elite ormas Islam justru menjadi bagian dari struktur yang menindas dan merugikan umat, seperti dalam sengketa lahan antara petani Wongsorejo Banyuwangi dengan korporasi.

Pada dasawarsa 1980-an, ketika NU memutuskan kembali ke *khittah* dan keluar dari gelanggang politik praktis, almarhum Gus Dur (yang menjadi ketua PBNU saat itu) sudah menyerukan, bahwa ormas Islam (terutama NU dalam konteks pembicaraan Gus Dur ketika itu) yang abai, bungkam, dan menutup mata dari problem kehidupan umat, niscaya keberadaannya tak relevan.[49] Saat ini, kita justru menyaksikan tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka ormas Islam terlampau asyik bergelut dalam permainan politik, atau menghabiskan terlalu banyak energi untuk isu-isu yang sebenarnya tidak aktual dengan kehidupan umat, seperti isu-isu identitas yang disinggung sebelumnya.

Karenanya, perlu adanya pergeseran fokus dan konsentrasi organisasi-organisasi itu, dari hal-hal yang berjarak dan terasing dari problem keumatan, menuju pembelaan terhadap umat-umat yang tertindas[50] dan

49 Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm 197.

50 Roy Murtadho, "Agama Dunia: Kritik Terhadap Tafsir Agama Anti Massa-Rakyat", *IndoPROGRESS*, 14 Oktober 2016.

upaya peningkatan kesejahteraan mereka secara struktural, melalui penghapusan upah murah bagi kalangan pekerja; redistribusi lahan bagi petani; pembentukan koperasi-koperasi, *syirkah-syirkah*, dan lembaga keuangan & pendanaan, yang bukan hanya sesuai dengan hukum Islam, tapi juga sesuai dengan nilai Islam yang berupaya menciptakan keadilan ekonomi; dst.[51] Bukankah suatu organisasi berbasis Islam hanya bisa ada karena keberadaan umat? Maka sudah waktunya ormas-ormas ini memberi perhatian yang lebih lagi pada persoalan umat.

Upaya-upaya semacam ini memang sudah pernah atau sedang dilakukan, namun belum menjadi agenda yang mengemuka. Muhammadiyah, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir cukup aktif bergerak melalui langkah "Jihad Konstitusi". Yaitu, usaha meminimalisir ketimpangan ekonomi yang terwujud dalam ketimpangan kepemilikan alat produksi dan privatisasi, yang dilegalkan melalui regulasi. Jihad Konstitusi ini coba melawan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak sesuai atau bahkan "mengkhianati" amanat konstitusi, yang melegalkan praktik-praktik yang menggerogoti kedaulatan dan memperlebar ketimpangan, serta semakin menghimpit kehiduapan rakyat yang sudah susah dalam hidupnya.[52]

Sementara itu Nahdlatul Ulama, setidaknya melalui tokoh-tokohnya, ketika berada di periodenya yang "progresif", cukup responsif terhadap isu-isu sosial-kemasyarakatan umat saat itu. Saya kira, kita tak perlu ragukan komitmen Gus Dur terhadap perbaikan kondisi hidup umat (dan bukan hanya soal toleransi dan pluralisme) serta pembelaan serta keberpihakannya terhadap umat, utamanya yang tertindas, baik selama menjabat sebagai ketua umum PBNU, maupun sebagai Presiden RI. Di tubuh NU, ketika ia memimpin, ia memunculkan satu paradigma yang dikenal sebagai *syu'un ijtima'iyyah* atau (kepedulian) terhadap problem kemasyarakatan. Dengan itu, ia coba menggeser perhatian yang sebelumnya hanya diarahkan pada soal-soal keagamaan *an sich* semata, kepada perkara-perkara yang lebih konkret di tengah umat.

51 Muhammad al-Fayyadl, "Membangun Keberislaman yang Materialis: Arah Perjuangan Ekonomi-Politik Islam Progresif", *Islam Bergerak*, 7 Oktober 2016.

52 Muhammad al-Fayyadl, "Memahami Progresifnya Muhammadiyah", *Islam Bergerak*, 24 Juni 2015.

Sebelum menjadi ketua PBNU, bersama segolongan generasi muda NU ketika itu, ia sudah mendorong keterlibatan NU dalam upaya perbaikan kondisi dan pemberdayaan umat. Dalam keputusan Muktamar NU Ke-26 pada tahun 1979, hal ini terungkap secara eksplisit, bahwa NU harus memberi sumbangsih dalam "proses demokratisasi, upaya penghapusan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, upaya untuk membentuk *rule of law* dan membela keadilan, upaya untuk memelihara sumber daya alam dan melindunginya dari pengrusakan, penyalahgunaan, dll".[53]

Secara tak langsung, ia juga mendorong terbentuknya satu generasi muda NU yang peka terhadap isu-isu sosial-ekonomi kemasyarakatan dan terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang berupaya melakukan transformasi dari bawah. Beberapa persoalan umat ketika itu benar-benar menjadi perhatian mereka dan mendorong mereka untuk angkat suara menyikapi kasus-kasus itu. Yang paling mengemuka, misalnya, ketika marak kasus pengambilan tanah oleh negara dan penggusuran penduduk desa untuk pembangunan, yang memuncak pada Kasus Kedung Ombo (proyek pembangunan bendungan besar yang menyebabkan banyak masyarakat tergusur tanpa ganti rugi memadai), para intelektual muda NU cukup tanggap dan aktif menyuarakan pembelaan dalam isu ini.[54]

Mereka menggelar diskusi-diskusi untuk membahas kasus ini dan mencetak publikasi-publikasi guna menyebarluasakan gagasan. Pada tahun 1992, terbit satu buku yang merupakan hasil diskusi atas problem pengambilalihan lahan ini, yang kesimpulan dan rekomendasinya cukup radikal untuk ukuran saat itu, ketika kekuasaan Orde Baru masih cukup kuat. Salah satunya menyatakan,

> "Dari segi teori, dapat disimpulkan bahwa ideologi developmentalisme/pembangunanisme yang melatarbelakangi program-program pemerintah dalam kenyataannya sudah menggeser ideologi Pancasila. Penerapan ideologi developmentalisme telah memunculkan berlapis-lapis masalah, yang kesemuanya memfokus pada terjadinya ketidakadilan sosial.

---

53 van Bruinessen, *NU*, hlm 250.

54 Muhammad Nashirulhaq, "Belok Kiri Lagi, PMII!", *Islam Bergerak*, 24 April 2016.

> Ideologi pembangunan telah mengakibatkan proses makin tersingkirnya orang-orrang yang sudah di tepi (marginalisasi); semakin termiskinkannya orang-orang yang sudah miskin; dan semakin tak berdayanya orang-orang yang sudah kurang berdaya".

Dalam buku serupa yang berjudul *Agama dan Hak Rakyat,* sikap mereka tegas, bahwa negara harus menghargai hak rakyat, termasuk mengembalikan lahan dan tanah yang diambilalih secara paksa.

Kita tentu merindukan agamawan-agamawan dan tokoh-tokoh (ormas) Islam seperti ini. Yang tak hanya bersuara ketika kitab sucinya dianggap dinistakan oleh orang lain, tapi juga berteriak lantang ketika nilai-nilai dalam kitab sucinya: kemanusiaan, kesetaraan, pemerataan, dan keadilan sosial, dihinakan dan dinistakan. Yang berdiri bersama umat ketika mereka ditindas, dihisap, dieksploitasi, dan dirampas hak-haknya. Serta memikirkan masalah umat untuk mencari pemecahannya dan memperbaiki kehidupannya. Sudah saatnya kita mendorong kelompok Islam dan tokohnya untuk membela Islam bukan hanya sebagai identitas. Tetapi, membela juga umatnya, dan yang terpenting: membela dan memperjuangkan nilai-nilainya. Itulah, membela Islam yang sesungguh-sungguhnya. Aksi Bela Islam yang hakiki.***

Sumber: http://islambergerak.com/2016/12/menuju-bela-islam-yang-hakiki/

Biodata Penulis

Arianto Sangaji, kandidat doktor di York University, Kanada, *anggota redaksi IndoPROGRESS*

Azhar Irfansyah, mahasiwa Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta.

Eko Prasetyo, aktif di Social Movement Institute (SMI), Jogyakarta

Fathimah Fildzah Izzati, staf peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *anggota redaksi IndoPROGRESS*

Ian Wilson, dosen politik dan kajian keamanan, juga peneliti di Asia Research Centre, Universitas Murdoch, Australia

Iqra Anugrah, adalah kandidat doktor ilmu politik di Northern Illinois University, *anggota redaksi IndoPROGRESS*. Beredar di twitland dengan id *@libloc*

Muhammad Azka Fahriza, *redaktur Islam Bergerak*, mahasiswa falsafah Universitas Paramadina

Muhammad Nashirulhaq, Mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bisa disapa di akun *@nashirulhaq_*

Roy Murtadho, Aktivis Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan *editor di Islam Bergerak*